

DIKTAT

EKONOMI PEMBANGUNAN



Oleh

KHAIRINA TAMBUNAN, MEI
NIP. 19850112 201903 2 014

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2020

EKONOMI PEMBANGUNAN

Oleh

KHAIRINA TAMBUNAN, MEI
NIP. 19850112 201903 2 014

KONSULTAN:

DR. ISNAINI HARAHAHAP, MA
NIP. 19750720 200312 2 002

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA

2020

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan diktat ini dengan baik, shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah mengangkat harkat dan martabat manusia dari alam kegelapan kepada alam kemuliaan.

Penulisan diktat ini sebagai bahan perkuliahan yang menyajikan tentang Ekonomi Pembangunan secara dasar dan umum untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Penulis berharap diktat ini dapat bermanfaat dalam mengkaji ilmu tentang Ekonomi Pembangunan.

Penulis sangat bersyukur atas selesainya diktat Ekonomi Pembangunan ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa segala yang dilakukan dalam penulisan Diktat Ekonomi Pembangunan ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan diktat ini. Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ganjaran yang terbaik dihadapan Allah Swt.

Penulis juga menyadari bahwa diktat yang sangat sederhana ini, masih banyak kekurangan dan kesalahan. karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan diktat ini. Dengan demikian, diktat ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan oleh semua pihak.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Juni 2020

Penulis

Khairina Tambunan, MEI

NIP. 19850112 201903 2 014

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I Ekonomi Pembangunan : Perspektif Global	 1
A. Definisi, Konsep, Teori Dan Tujuan Ekonomi Pembangunan.....	1
B. Perbedaan: Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi.....	3
C. Masalah Pembangunan Ekonomi Negara Berkembang	4
D. Soal Diskusi	5
BAB II Paradigma Pembangunan	6
A. Pendahuluan	6
B. Fase Ekonomi Pembangunan	6
C. Paradigma Pembangunan	7
D. Evolusi Paradigma Pembangunan.....	8
E. Soal-soal Latihan.....	9
BAB III Karakteristik Negara-Negara Berkembang dan Teori-Teori Klasik	
Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi.....	10
A. Karakteristik Negara-Negara Berkembang	10
B. Indikator Dasar: Pendapatan Riil, Kesehatan dan Pendidikan.....	10
C. Model Perubahan Struktural	11
D. Teori Ketergantungan Internasional.....	12
E. Revolusi Neoklasik	12
F. Teori Pertumbuhan Baru (Teori Pertumbuhan Endogen)	12
G. Soal Latihan	13
BAB IV4 Pertumbuhan, Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan.....	14
A. Distribusi Pendapatan Dan Ketimpangan Pendapatan.....	14
B. Kemiskinan	15
C. Distribusi Pendapatan dalam Perspektif Islam.....	16
D. Soal dan latihan	17
BAB V Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi.....	18
A. Pendahuluan	18
B. pertumbuhan penduduk dan kualitas Hidup.....	16
C. Kontroversi Teori Maltus dan Transisi Demografi	18
D. Konsekuensi Pertumbuhan Penduduk Yang Tinggi	20
E. Kebijakan Untuk Mengatasi Permasalahan Pertumbuhan	20
F. Soa-soal Latihan.....	21
BAB VI Pengangguran	22
A. Masalah Ketenagakerjaan	22

B. Dimensi-Dimensi Pengangguran	23
C. Dampak Pengangguran	24
D. Pengangguran Dalam Islam	24
E. Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan.....	26
F. Soal Latihan	26
BAB VII Urbanisasi dan Migrasi	27
A. Dilema Migrasi Dan Urbanisasi.....	27
B. Urbanisasi : Kecenderungan Dan Proyeksi	28
C. Pengangguran Di Perkotaan.....	30
D. Menuju Teori Ekonomi Tentang Migrasi Desa-Kota	30
E. Strategi Komprehensif Bagi Penanggulangan Masalah Migrasi Dan Kesempatan Kerja	30
F. Soal Latihan	31
BAB VIII Pembiayaan Pembangunan Dan UMKM	32
A. Pembiayaan Pembangunan.....	32
B. Peran Perbankan Syariah Pada Pembiayaan Pembangunan.....	32
C. Zakat Dan Perannya Dalam Pembangunan.....	33
D. Wakaf Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan.....	34
E. Sukuk Dan Pembangunan Ekonomi.....	35
F. Soal-soal Latihan	36
BAB IX Transformasi Pertanian Dan Pembangunan Daerah Pedesaan .	37
A. Peran Sektor Pertanian Bagi Pembangunan	37
B. Konsep Pembangunan Pertanian.....	38
C. Peran Penting Kaum Perempuan Pada Pembangunan Daerah Pedesaan	39
D. Perilaku Petani dan Pembangunan Agrikultur	40
E. Permasalahan Sektor Pertanian	40
F. Ekonomi Pedesaan	40
G. Strategi Pertanian	42
H. Soal Latihan	44
BAB X Lingkungan Hidup Dan Kaitannya Pembangunan	45
A. Pembangunan dan Lingkungan Hidup	45
B. Degradasi Lingkungan Hidup	47
C. <i>Sustainable Development</i>	47
D. Model Ekonomi Lingkungan Hidup	48
E. Hubungan Lingkungan Terhadap Populasi, Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi (Environmental Kuznets Curve).....	50
F. Soal Latihan	52
BAB XI Pendidikan Dalam Pembangunan.....	53

A. Pendidikan Sebagai Investasi Pengembangan Sumber Daya Manusia	53
B. Pendidikan Di Negara-Negara Berkembang	54
C. Pendidikan Dan Perempuan	55
D. Pendidikan Dalam Pandangan Islam.....	56
E. Soal-Soal Latihan	57
BAB XII Utang Negara-Negara Dunia Ketiga Dan Stabilitas	
Makroekonomi.....	58
A. Krisis Utang Pada Dekade 1980 – an.....	58
B. Upaya Penanggulangan Ketidakstabilan Makro Ekonomi.....	59
C. Strategi Untuk Melepaskan Diri Dari Utang.....	60
D. Soal Diskusi	61
Daftar Pustaka.....	62

BAB 1

Ekonomi Pembangunan : Perspektif Global

Tujuan Pembelajaran

Pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami konsep dan paradigma-paradigma pembangunan ekonomi yang berkembang hingga saat ini. Bagian ini akan menjelaskan evolusi makna pembangunan dan indikator-indikator pembangunan. Secara umum, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan evolusi makna pembangunan dan berbagai indikator pembangunan.

A. Definisi, Konsep, Teori Dan Tujuan Ekonomi Pembangunan

Istilah pembangunan ekonomi atau sering disebut dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi sering digunakan secara bergantian dengan maksud yang sama. Dapat dikatakan ada pertumbuhan ekonomi apabila terdapat lebih banyak output, dan dikatakan terjadi pembangunan atau perkembangan ekonomi tidak hanya terdapat lebih banyak output (GNP), tetapi juga terjadi perubahan-perubahan dalam kelembagaan dan pengetahuan teknik dalam menghasilkan output yang lebih banyak tersebut. Todaro dan Smith menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh nilai pokok, yaitu kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, meningkatnya rasa harga diri masyarakat sebagai manusia, dan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.¹ Pembangunan ekonomi dimaknai sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana meningkatkan GNP per tahun saja. Pembangunan ekonomi bersifat multidimensi yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya aspek ekonomi saja. Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.²

Proses kenaikan pendapatan per kapita secara terus menerus dalam jangka panjang saja tidak cukup untuk mengatakan bahwa negara tersebut telah terjadi pembangunan ekonomi. Perbaikan struktur sosial, sistem kelembagaan (baik organisasi maupun aturan main), perubahan sikap dan perilaku masyarakat juga merupakan komponen penting dari pembangunan ekonomi, selain masalah pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.³ Artinya, tujuan pembangunan harus difokuskan kepada tingkat kesejahteraan individu (masyarakat) moril dan material yang disebut dengan istilah depoperalisasi

¹ Michael P. Todaro. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Edisi Keenam*. (Jakarta: Erlangga 2003).

² Lincoln Arsyad. *Ekonomi Pembangunan*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010).

³ Michael P. Todaro. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Edisi Keenam*. (Jakarta: Erlangga 2003).

(*depauperization*) oleh Adelman.⁴ Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional (Eva, 2013). Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang (Boediono, 1981:2)

Secara umum, istilah pertumbuhan ekonomi biasanya digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi di negara-negara maju, sedangkan istilah pembangunan ekonomi untuk menyatakan perkembangan ekonomi di negara yang sedang berkembang. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang, disertai dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan dalam keadaan sistem politik, struktur sosial, nilai-nilai masyarakat dan struktur kegiatan ekonominya.

Dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi memiliki tiga sifat penting, yaitu⁵:

1. Suatu proses, yang berarti merupakan perubahan yang terjadi secara terus menerus.
2. Usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita
3. Kenaikan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang

Menurut Rostow, pembangunan ekonomi berarti suatu proses yang menyebabkan antara lain⁶:

1. Perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, maupun sosial yang pada mulanya mengarah ke dalam suatu daerah menjadi berorientasi ke luar.
2. Perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu dari menginginkan banyak anak menjadi membatasi jumlah keluarga.
3. Perubahan dalam kegiatan penanaman modal masyarakat, dari melakukan penanaman modal yang tidak produktif misalnya penanaman modal berupa emas, tanah maupun rumah menjadi digunakan untuk wiraswasta.
4. Perubahan cara masyarakat dalam menentukan kedudukan seseorang dalam masyarakat, dari semula ditentukan oleh kedudukan keluarga atau suku bangsa menjadi ditentukan oleh kesanggupan melaksanakan pekerjaan.
5. Perubahan dalam pandangan masyarakat yang mulanya berkeyakinan bahwa kehidupan manusia ditentukan oleh keadaan alam sekitarnya, dan selanjutnya berpandangan bahwa manusia harus memanipulasi alam sekitarnya untuk menciptakan kemajuan.

Tujuan dari Pembangunan Ekonomi adalah :

⁴ Irma Adelman. *Development Economics: A Reassessment of Goals*. (American Economics Review Paper and Proceedings, 1975), hlm. 302 – 309.

⁵ Sadono Sukirno. *Ekonomi Pembangunan*. (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Bina Grafika, 1985), hlm. 13

⁶ M.L. Jhingan. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

1. Meningkatkan tersedianya serta memperluas distribusi kebutuhan dasar rakyat banyak.
2. Meningkatkan taraf hidup, antara lain pendapatan yang meningkat, kesempatan kerja yang cukup, pendidikan yang lebih baik, perhatian lebih besar kepada nilai-nilai kebudayaan dan kemanusiaan (dalam arti kesejahteraan sosial, jasmani dan rohani).
3. Memperluas pilihan-pilihan sosial ekonomi dari perorangan dan bangsa, dengan memberikan kebebasan dari ketergantungan.⁷

Manfaat pembangunan bagi suatu negara haruslah dirasakan oleh seluruh masyarakat. Artinya, bahwa pembangunan tidak hanya untuk segelintir orang saja atau kelompok tertentu, tetapi harus dapat dinikmati oleh semua lapisan dalam masyarakat. Adapun manfaat yang dapat ditimbulkan akibat adanya pembangunan adalah sebagai berikut⁸:

1. Tingkat Produksi Meningkat Pembangunan adalah suatu proses kenaikan Gross Domestic Product (GDP).
2. Adanya Berbagai Alternatif Kemudahan
3. Terdapat Perubahan Pada Aspek Sosial, Ekonomi, dan Politik
4. Meningkatnya Akan Nilai-Nilai Kebersamaan
5. Tingkat Kesejahteraan Penduduk Meningkat

B. Perbedaan: Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi

Menurut Sukirno, Ekonomi Pembangunan didefinisikan sebagai suatu cabang dari Ilmu Ekonomi yang bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan cara- cara untuk mengatasi masalah-masalah itu, supaya negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat.⁹ Diketahui bahwa tujuan dalam ekonomi pembangunan, yaitu menganalisis masalah-masalah yang terjadi di negara sedang berkembang; faktor-faktor penyebab dan kebijakan yang ditempuh untuk pembangunan negara-negara sedang berkembang.

Ekonomi pembangunan agak berbeda dengan Ilmu Ekonomi yang lain seperti Ilmu ekonomi mikro maupun Ilmu ekonomi makro. Perbedaananya, bahwa ekonomi pembangunan belum memiliki pola analisis yang mapan yang dapat diterima oleh kebanyakan ahli-ahli ekonomi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu¹⁰:

1. sangat kompleksnya masalah pembangunan;

⁷ Zulkarnain Djamin. *Perekonomian Indonesia*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 1993), hlm. 9.

⁸ M. Hasan & M. Azis. *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. (Makassar: CV. Nur Lina Bekerjasama dengan Pustaka Taman Ilmu, 2018)

⁹ Sadono Sukirno. *Ekonomi Pembangunan*. (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Bina Grafika, 1985).

¹⁰ Endang Mulyani. *Modul 1: Konsep Dasar dalam Pembangunan Ekonomi dan Permasalahan Dasar Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang*. UT

2. banyaknya faktor yang mempengaruhi pembangunan dan banyaknya faktor yang terpengaruh oleh pembangunan.
3. ketiadaan teori-teori pembangunan yang dapat menciptakan suatu kerangka dasar dalam memberikan gambaran mengenai proses pembangunan ekonomi.

Di samping beberapa faktor di atas, para ekonom sampai saat ini belum mencapai kesepakatan mengenai faktor-faktor apa yang memegang peranan paling penting dalam pembangunan ekonomi, dan bagaimana mekanisme proses pembangunan ekonomi tersebut terjadi. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa pola analisis ekonomi pembangunan tidak dapat ditentukan sifat-sifatnya. Apabila dicermati, pada hakikatnya pembahasan-pembahasan mengenai pembangunan ekonomi dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu

1. pembahasan mengenai pembangunan ekonomi, baik yang bersifat deskriptif maupun analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai berbagai sifat perekonomian dan masyarakat di negara sedang berkembang serta implikasi sifat-sifat tersebut kepada kemungkinan untuk membangun ekonomi;
2. pembahasan mengenai pembangunan ekonomi yang bersifat memberikan berbagai pilihan kebijakan pembangunan yang dapat dilaksanakan dalam upaya untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang.¹¹

Dapat diketahui bahwa antara ekonomi pembangunan dengan pembangunan ekonomi berbeda. Ekonomi pembangunan merupakan ilmu yang mempelajari tentang pembangunan ekonomi. Sedangkan pembangunan ekonomi atau sering pula disebut perkembangan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang disertai dengan perubahan ciri-ciri penting dalam suatu masyarakat (modernisasi).

C. Masalah Pembangunan Ekonomi Negara Berkembang

Adanya permasalahan yang dihadapi negara berkembang ini membuat negara berkembang tertinggal oleh negara maju. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh negara sedang berkembang. Faktor penyebab terjadinya ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang, yaitu¹²:

1. Menurunnya pendapatan per kapita.
2. Terjadi inflasi yang tidak proporsional di negara berkembang dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antardaerah.

¹¹ Ibid

¹² Irma Adelman dan Cynthia' Taft Morris. *Economic Growth and Social Equity Developing Countries*. (Stanford: Stanford University Press, 1973)

4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*) sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan naiknya harga-harga barang hasil industri untuk melindungi golongan kapitalis.
7. Buruknya nilai tukar mata uang negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang.
8. Kurang berkembangnya industri-industri kecil seperti industri rumah tangga, UMKM

D. Soal Diskusi

1. Jelas konsep dari Ekonomi Pembangunan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi.
2. Jelaskan masalah-masalah yang ada di negara berkembang.
3. Jelaskan manfaat dan tujuan Pembangunan Ekonomi.

BAB 2

Paradigma Pembangunan

Tujuan Pembelajaran

Pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan Fase Ekonomi Pembangunan
2. Menjelaskan Paradigma Pembangunan
3. Menjelaskan Evolusi Paradigma Pembangunan

A. Pendahuluan

Sejarah pemikiran pembangunan ekonomi diwarnai dengan perubahan paradigma pembangunan, dari pemujaan terhadap pertumbuhan hingga paradigma pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok, pembangunan mandiri, pembangunan berkelanjutan, pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut jenis, perempuan dalam pembangunan, pembangunan regional, dan paradigma pembangunan masyarakat.

B. Fase Ekonomi Pembangunan

Paradigma ekonomi konvensional terdiri dari tiga fase yaitu, Fase Klasik, Keynesian, dan Neo Klasik.¹³

1. Fase Klasik

Fase masa klasik dikembangkan oleh ekonom klasik seperti Adam Smith, David Ricardo, Maltus, dan John Stuart Mill. Adam Smith dengan karyanya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation* yang dipublikasikan pada tahun 1776, yaitu menyerahkan aturan dan penguasaan ekonomi kepada masyarakat (individual), didasarkan pada hukum permintaan dan penawaran, sedangkan pemerintah tidak campur tangan. Teori ini dikenal sebagai sistem ekonomi liberal dan banyak dianut oleh negara-negara barat seperti Amerika dan beberapa Negara di Eropa. Aliran klasik lain, yaitu ekonomi komunis (Marxis) yang juga disebut dengan sosialis yang banyak dianut oleh negara-negara komunis seperti Rusia, China, Korea Utara dan sebagian negara-negara Eropa Timur.

2. Fase Keynesian

Aliran ini muncul karena terjadinya Great Depression atau depresi ekonomi di Amerika pada tahun 1929-1932. Menurut Keynes dengan bukunya *The General Theory of Employment, Interest and Money* yang diterbitkan tahun 1936, depresi ekonomi ini disebabkan kesalahan sistem ekonomi *laissez faire*. Keynes pun mengusulkan untuk meninggalkan ideologi *laissez faire* dan pemerintah harus lebih banyak campur tangan dalam mengendalikan dan mempengaruhi perekonomian, sementara pengusaha swasta diberi kepercayaan dalam kegiatan produksi dan pemilihan faktor-faktor produksi. Teori Keynes pun banyak diadopsi dan dipergunakan negara-negara baru merdeka tersebut untuk membangun perekonomiannya.

¹³ Isnaini Harahap. *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*. (Medan: Pernada Publishing, 2018).

3. Fase Neo Klasik

Fase ketiga yang dimulai pada tahun 1970-an memiliki fokus yang berbeda dengan fase kedua. Pada fase ini, ideologi Keynes dan sosialisme mulai melemah dan ekonomi cenderung anti kekuasaan (negara) dan kembali kepada pasar bebas.

Ketiga fase di atas, menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan kebijakan pembangunan di negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang yang meniru model barat mengalami kebingungan karena pertentangan-pertentangan konsep Neo Klasik dan Keynesian serta Sosialis. Sehingga membuat tugas negara-negara berkembang sangat rumit, tidak hanya mengembangkan ekonomi dengan cara yang tepat, efisien dan berkeadilan, tetapi juga harus mengubah ketidaksinambungan pembangunan yang ditimbulkan oleh teori dan kebijakan yang tidak cocok untuk negeri berkembang tersebut.

C. Paradigma Pembangunan

Di antara paradigma pembangunan di negara-negara berkembang tersebut adalah¹⁴:

1. Paradigma Modernisasi

Paradigma ini muncul setelah perang dunia kedua di mana pasar dalam negeri Amerika mengalami kejenuhan dan terancam kehilangan mitra dagang. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada tahun 1946/1947 pemerintah Amerika Serikat membuat kebijakan ekonomi **Marshall Plan** yang bertujuan untuk membantu dan memperbaiki perekonomian negara-negara berkembang dan negara-negara Eropa pasca perang serta membentuk dua lembaga keuangan yang bertugas membantu negara-negara Eropa dan negara berkembang, yaitu World Bank dan International Monetary Funds (IMF). Keberhasilan pembangunan di negara-negara Eropa kemudian ditransfer ke negara-negara dunia ketiga.

2. Paradigma ketergantungan (Dependensi)

Menurut paradigm dependensi sentuhan modernisasi merupakan penyebab negara-negara berkembang mengalami keterbelakangan, dan kemajuan dari negara-negara maju menyebabkan keterbelakangan dari negara-negara lainnya (*the development of underdevelopment*). Secara filosofis, teori dependensi melihat bahwa pembangunan bukan hanya proses industrialisasi, peningkatan output dan produktifitas, namun juga peningkatan standar hidup bagi setiap penduduk di negara dunia ketiga.

3. Paradigma sistem dunia

Paradigma sistem dunia muncul sebagai kritik atas paradigm modernisasi dan dependensi. Pencetus teori ini, Immanuel Wallerstein (1974) memandang bahwa dunia adalah sebuah sistem kapitalis yang mencakup seluruh negara di dunia, dan integrasi yang terjadi lebih banyak dikarenakan oleh faktor ekonomi dari pada kepentingan politik. Menurut Wallerstein sistem dunia kapitalis dibagi kedalam tiga jenis, yaitu negara core (pusat), semiperiferi (setengah pinggiran), dan negara periferi (pinggiran). Perbedaan ketiga jenis negara ini ditentukan oleh kekuatan

¹⁴ Ibid, h.30-35.

ekonomi dan politik dari masing-masing kelompok. Menurut teori ini, negara-negara di dunia bisa naik dan turun kelas. Negara pusat bisa saja menjadi negara semi pinggiran, negara semi pinggiran bisa menjadi negara pusat atau negara pinggiran, dan negara pinggiran bisa menjadi negara semi pinggiran. Hal ini terbukti pada perang Dunia II, Inggris dan Belanda yang sebelumnya menjadi negara pusat turun kelas digantikan Amerika Serikat pasca kehancuran dahsyat di Eropa.

D. Evolusi Paradigma Pembangunan¹⁵

1. Pandangan Tradisional Tentang Pembangunan

Pandangan tradisional melihat bahwa pembentukan modal merupakan syarat pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan modal asing dan melakukan industrialisasi.

2. Paradigma Baru Dalam Pembangunan

Beberapa paradigma baru dalam pembangunan kemudian berkembang, seperti paradigma pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok (*basic needs*) pembangunan mandiri (*self reliant development*), pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam (*eco development*), pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis (*ethno development*). Berikut beberapa paradigma baru yang muncul setelah tahun 1960:

- a. Strategi pertumbuhan dengan distribusi
- b. Strategi kebutuhan pokok
- c. Paradigma pembangunan Sumber Daya Manusia (*Human Development Paradigma*)
- d. Strategi pembangunan berkelanjutan
- e. Strategi berdimensi etnik
- f. Paradigma partisipasi masyarakat dalam pembangunan (*General Public Participation Paradigma*)
- g. Paradigma Syari'ah (*syari'ah paradigma*)

3. Paradigma Islam Tentang Pembangunan

- a. Paradigma pembangunan menurut Ibnu Khaldun

Menurut Ibn Khaldun, untuk menciptakan kesejahteraan, maka setiap negara harus melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan beberapa komponen yang saling berhubungan satu sama lain sehingga membuat sebuah lingkaran yang disebut M. Umer Chapra dengan daur keadilan atau *cycle of equity*. Komponen-komponen tersebut adalah kekuatan penguasa (*al-mulk*), syari'ah (*hukum*), rakyat (*ar-rijal*), kekayaan (*al-mal*), pembangunan (*al-imarah*), dan keadilan (*al-'adl*). Semua variable tersebut bekerja dalam sebuah lingkaran yang dinamis saling tergantung dan saling mempengaruhi dan menjadi faktor yang menentukan kemajuan suatu peradaban/negara.

¹⁵ Ibid, h. 35 - 46.

Keunikan konsep Ibn Khaldun ini adalah hubungan antar variable yang saling terkait satu sama lain sehingga satu variable bisa menjadi pemicu sedangkan variable yang lain dapat bereaksi ataupun tidak dalam arah yang sama. Pembangunan merupakan unsur penting dalam masyarakat, tanpa pembangunan masyarakat tidak akan maju dan berkembang. Namun, perkembangan tidak akan berari tanpa keadilan.

b. Paradigma pembangunan menurut Khursid Ahmad

Menurut Khursid Ahmad filosofis pembangunan ekonomi terdiri dari tauhid, keadilan, khilafah dan tazkiyah. Konsep pembangunan yang Islami sebenarnya dapat ditarik dari konsep tazkiyah, yang berarti penyucian terhadap sikap dan hubungan manusia dengan semesta di muka bumi. Tazkiyah juga mendorong pembangunan tidak hanya pada hal-hal yang bersifat fisik, material, melainkan jugak aspek moral spiritual. Ukuran keberhasilan juga kualitas moral pelaku pembangunan.

c. Paradigma pembangunan menurut Umar Chapra

Dengan menggunakan konsep *Islamic worldview* yang didasarkan pada tiga konsep fundamental yaitu tauhid (keesaan Allah SWT), khilafah, dan keadilan ('adalah). Adapaun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai hamba Allaah, juga sekaligus khalifatullah fii ardh bertugas untuk memakmurkan bumi. Tugas manusia adalah beribadah dan memakmurkan bumi dan diberi bekal pengetahuan dan aturan-aturannya. Kedua tugas ini akan berjalan baik dan sukses sangat tergantung pada jalan yang dipilihnya. Pilihan atas jalan tersebut mempengaruhi arah dari pembangunan.

Pembangunan dalam islam juga harus mengacu pada tujuan syari'at (*maqashid syari'ah*) yaitu memelihara iman (*faith*), hidup (*life*), nalar (*intellect*), keturunan (*posteirity*) dan kekayaan (*wealth*) sehingga tercapai falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Konsep ini menjelaskan bahwa sistem ekonomi hendaknya dibangun berawal dari suatu keyakinan (iman) dan berakhir dengan kekayaan (property). Untuk mewujudkan hal tersebut harus dilakukan tindakan kebijakan sebagai solusi bagi pembangunan yang disertai keadilan dan stabilitas yaitu:

- 1) Memberikan kenyamanan kepada faktor manusia
- 2) Mengurangi konsentrasi kekayaan
- 3) Melakukan rekonstukturisasi ekonomi
- 4) Melakukan restrukturisasi keuangan
- 5) Perencanaan kebijakan strategis

E. Soal-soal Latihan

1. Jelaskan tentang fase-fase ekonomi pembangunan
2. Jelaskan tentang paradigm baru dalam ekonomi pembangunan
3. Jelaskan tentang paradigm Islam dalam pembangunan

Bab III

Karakteristik Negara-Negara Berkembang dan Teori-Teori Klasik Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi

Tujuan Pembelajaran

Pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- a. Karakteristik Negara-Negara Berkembang
- b. Teori Tahapan Linier
- c. Teori Perubahan Struktural Lewis
- d. Teori Ketergantungan Internasional
- e. Kontrarevolusi neoklasik
- f. Teori Pertumbuhan Baru : Teori Pertumbuhan Endogen

A. Karakteristik Negara-Negara Berkembang

Karakteristik negara-negara berkembang dari segi ekonomi¹⁶ :

1. Tingkat pendapatan perkapita rendah
2. Impor lebih besar daripada ekspor
3. Jumlah pengangguran tinggi
4. Mengandalkan sektor primer
5. Tingkat korupsi tinggi

Secara umum, negara-negara berkembang memiliki kesamaan karakteristik, yaitu¹⁷:

1. ketergantungan pada sektor pertanian primer
2. rendahnya tingkat produksi
3. ketergantungan yang besar dan rentannya hubungan internasional
4. pasar dan informasi yang tidak sempurna
5. tingginya tingkat pengangguran
6. rendahnya tingkat kehidupan
7. tingginya pertambahan penduduk

Indikator dasar negara berkembang, yaitu:

1. Pendapatan Riil
2. Pendidikan
3. Kesehatan

B. Teori Tahapan Linier

1. Teori Pertumbuhan Rostow

Rostow melalui pendekatan sejarah dalam menjelaskan proses perkembangan ekonomi, ia membedakannya dengan lima tahap, yaitu¹⁸ :

¹⁶ Santi R. Siahaan, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, (Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2013), hlm. 31.

¹⁷ Isnaini Harahap. *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*. (Medan: Pernada Publishing, 2018). Hlm. 76 – 86.

1. Tahapan perekonomian tradisional
2. Tahap prakondisi untuk tinggal landas
3. Tahap Tinggal landas
4. Tahap Menuju kedewasaan
5. Era konsumsi tinggi

Teori Pertumbuhan Harrod Domar

Harrod-Domar menspesifikasikan lebih lanjut hubungan besaran tingkat tabungan/investasi untuk menghasilkan tingkat pertumbuhan tertentu yang ditunjukkan dengan memperkenalkan suatu konsep baru, yaitu rasio antara investasi (capital) dengan pendapatan nasional (output), yaitu konsep capital-output ratio) di mana semakin tinggi tingkat tabungan akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Rumus ini juga memberi jalan pada upaya pemecahan masalah untuk meningkatkan pertumbuhan melalui penambahan dana dari luar negeri hal tabungan dalam negeri tidak mencukupi atau adanya *savings-investment gap*¹⁹.

C. Model Perubahan Struktural Lewis

Lewis mengasumsikan perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu perekonomian tradisional dan perekonomian industri. Pada perekonomian tradisional, Lewis mengasumsikan bahwa di daerah pedesaan dengan perekonomian tradisional mengalami surplus tenaga kerja. Perekonomian tradisional adalah bahwa tingkat hidup masyarakat berada pada kondisi subsisten, hal ini di akibatkan kelebihan penduduk dan di tandai dengan produktivitas marjinal tenaga kerja sama dengan nol. Sehingga pangsa tenaga kerja terhadap output yang dihasilkan adalah sama, dan nilai upah riil ditentukan oleh nilai rata-rata produk marginal dan bukan produk marginal dari tenaga kerja. Di sini hukum law of diminishing return berlaku pada fungsi produksi. Sedangkan perekonomian Industri terletak pada perkotaan modern di mana tingkat produktivitas yang tinggi dan menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang di transfer sedikit demi sedikit dari sektor subsisten. Penambahan tenaga kerja akan meningkatkan output. Proses pertumbuhan berkesinambungan dan perluasan kesempatan kerja di sektor modern ini diasumsikan akan terus berlangsung sampai semua surplus tenaga kerja pedesaan diserap habis oleh sektor industri. Lalu tenaga kerja tambahan berikutnya hanya dapat ditarik dari sektor pertanian dengan biaya yang lebih tinggi karena hal tersebut akan mengakibatkan merosotnya produksi pangan. Sehingga terjadi perubahan structural terhadap perekonomian tersebut yang beralih dari perekonomian pertanian tradisional yang berpusat di pedesaan menjadi sebuah perekonomian industri modern yang berorientasi kepada pola kehidupan perkotaan.

¹⁸M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembanguna Dan Perencanaan*. (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 142-148.

¹⁹ Lembaga Administrasi Negara. *Teori dan Indikator Pembangunan*. (Jakarta : LAN, 2008), hlm 35-36.

D. Teori ketergantungan Internasional

Teori ketergantungan (dependensi) ini adalah teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut negara dunia berkembang. Teori ini menjelaskan keterbelakangan ekonomi negara berkembang disebabkan oleh perkembangan dan ekspansi negara-negara maju yang mengakibatkan negara berkembang hanya sebagai penerima akibat saja. Adapun beberapa tokoh teori ini seperti Paul Baran, Andre Gundre Frank dan Theotonio Dos Santos. Dalam teori ini ada tiga bentuk ketergantungan, yaitu:

1. Ketergantungan Neokolonial
2. Ketergantungan finansial
3. Ketergantungan teknologi-industrial

E. Revolusi Neoklasik

Teori pertumbuhan neoklasik pertama kali dikembangkan oleh Robert Solow melalui tulisan yang berjudul *A contribution of The Theory of Economics Growth* tahun 1956. Adapun beberapa tokoh ini, yaitu Robert Solow, Trevor Swan, dan Harrod-Domar. Aliran pemikiran ini mencoba mendefinisikan ulang teori pembentukan harga, produksi dan distribusi pendapatan melalui mekanisme permintaan dan penawaran di pasar. Alasan pentingnya, yaitu keterbelakangan bukan karena pengaruh ekstern tetapi karena adanya pengaruh internal dalam negara terbelakang. Terlalu banyaknya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi, menyebarnya korupsi, kegiatan ekonomi yang kurang intensif serta mislokasi sumberdaya merupakan sumber utama keterbelakangan negara tersebut. Aliran ini menganjurkan negara berkembang untuk menerapkan sistem pasar bebas.²⁰

F. Teori Pertumbuhan baru (Teori Pertumbuhan Endogen)

Teori pertumbuhan endogen ini dipelopori oleh Paul M Romer pada tahun 1986 dan Robert Lucas pada tahun 1988 sebagai kritikan terhadap teori neoklasik Solow yang tidak bisa menjelaskan dengan baik pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Pemahaman ini adalah respon dari perkembangan teknologi seperti kita lihat sekarang yang mampu menghasilkan teknologi modern sehingga dapat meningkatkan produksi. Model pertumbuhan endogen ini berasumsi bahwa proses pertumbuhan berasal dari tingkat perusahaan atau industri. Setiap industri memproduksi dengan skala hasil yang konstan. Sesuai dengan asumsi persaingan sempurna, Romer berasumsi bahwa cadangan modal dapat mempengaruhi output ditingkat industri sehingga memungkinkan terjadinya skala hasil yang makin meningkat ditingkat perekonomian secara keseluruhan²¹. Model endogen Romer

²⁰ Isnaini Harahap. *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*. (Medan: Pernada Publishing, 2018). Hlm.116

²¹ M.L. Jhingan. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 1993), hlm 162-165.

ini merupakan cara untuk memahami teori Harrod-Domar, yaitu pertumbuhan bergantung pada investasi.²²

G. Soal Latihan

1. Sebutkan karakteristik dari negara berkembang
2. Jelaskan model perubahan structural Lewis.
3. Sebutkan 5 tahapan proses perkembangan ekonomi menurut Rostow.
4. Jelaskan asumsi dari pertumbuhan endogen

²² Isnaini Harahap. *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*. (Medan: Pernada Publishing, 2018). Hlm.19

Bab IV Pertumbuhan, Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan

Tujuan Pembelajaran

Pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai distribusi pendapatan dan ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan dalam perspektif Islam.

A. Distribusi Pendapatan Dan Ketimpangan Pendapatan

Distribusi pendapatan merupakan suatu konsep yang membahas tentang penyebaran pendapatan setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat. Terdapat dua konsep pokok mengenai pengukuran distribusi pendapatan, yaitu konsep ketimpangan absolut dan konsep ketimpangan relatif. Konsep ketimpangan absolut merupakan konsep pengukuran ketimpangan yang menggunakan parameter dengan suatu nilai mutlak. Sedangkan konsep ketimpangan relatif merupakan konsep pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang membandingkan besarnya pendapatan yang diterima oleh seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dengan besarnya total pendapatan yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhan.²³ Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek dalam masalah kemiskinan yang perlu diperhatikan karena pada dasarnya distribusi pendapatan merupakan ukuran kemiskinan relatif.²⁴

Masalah ketimpangan dan distribusi pendapatan dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu²⁵:

1. Ketimpangan pendapatan antar golongan
2. Ketimpangan pendapatan antara perkotaan dan pedesaan
3. Ketimpangan pendapatan antar daerah

Ada tiga alat ukur tingkat ketimpangan pendapatan dengan bantuan distribusi ukuran, yakni Rasio Kuznets, Kurva Lorenz, dan Koefisien Gini.²⁶

• Rasio Kuznets

Kuznet menyatakan bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan akan makin merata. Sehingga memunculkan suatu hipotesis yaitu hipotesis U-terbalik. pendapatan akan semakin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi makin merata. Beberapa tahapan peningkatan dan kemudian penurunan ketimpangan pendapatan yang dikemukakan oleh Kuznet tidak dapat dihindari,

²³ Sukirno Sadono. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2006)

²⁴ Sukirno Sadono. *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, , 2013).

²⁵ Isnaini Harahap. *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*. (Medan: Pernada Publishing, 2018). Hlm. 151

²⁶ Ibid, hlm. 150 – 155.

namun semua tergantung pada proses pembangunan yang dijalankan oleh masing-masing negara.²⁷

- **Gini Ratio**

Gini ratio atau koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Indeks atau rasio gini ini berkisar antara 0 – 1, yang menjelaskan kadar pemerataan atau ketimpangan distribusi nasional. Jika rasio gini semakin kecil atau semakin mendekati angka nol maka distribusi pendapatannya semakin baik atau merata. Sebaliknya, jika rasio gini mendekati nilai 1 maka mengisyaratkan distribusi pendapatan semakin timpang.

- **Kurva Lorenz**

Kurva Lorenz adalah kurva yang menunjukkan ukuran distribusi pendapatan dengan penilaian merata, sedang dan timpang. Jika kurva Lorenz semakin jauh dari garis diagonal maka semakin besar ketimpangan distribusi pendapatannya. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin berimpit atau mendekati garis diagonal maka semakin merata distribusi pendapatannya.

B. Kemiskinan

Definisi kemiskinan dibentuk berdasarkan identifikasi terhadap kelompok masyarakat yang disebut miskin dengan kriteria tertentu, seperti pendapatan rata-rata, daya beli dan kemampuan konsumsi rata-rata. Kemiskinan dapat didefinisikan dengan kondisi pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, atau ketidakmampuan seseorang untuk memuaskan kebutuhan pokok atau ketidakmampuan seseorang untuk memuaskan kebutuhan dan keperluan materinya atau kondisi kekurangan materi dan sosial yang menyebabkan seseorang hidup di bawah standar kehidupan layak atau kondisi individu yang mengalami kekurangan relatif dibandingkan dengan individu yang mengalami kekurangan relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat. Chambers memberikan konsep kemiskinan ke dalam beberapa dimensi, yaitu kemiskinan (*proper*), ketidakberdayaan (*powerless*), ketergantungan (*dependency*), dan keterasingan (*isolation*).²⁸ Jenis kemiskinan ada 4 bentuk, yaitu:

1. Kemiskinan absolut
2. Kemiskinan relatif
3. Kemiskinan kultural
4. Kemiskinan struktural

Sedangkan bentuk kemiskinan berdasarkan sifatnya, yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan.

Berdasarkan World Bank Institute, ada tiga ukuran kemiskinan, yaitu:

1. Garis kemiskinan konsumsi

²⁷ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi* (edisi kesembilan, jilid I). (Jakarta : Erlangga, 2006).

²⁸ Isnaini Harahap. *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*. (Medan: Pernada Publishing, 2018). Hlm, 131-132.

Pengukuran ini memperkirakan tingkat pendapatan dan kebutuhan hidup minimal yang layak atau kebutuhan dasar seseorang atau rumah tangga. BPS Indonesia menggunakan pendekatan ini dalam menghitung penduduk miskin di Indonesia, di mana garis kemiskinan yang ditetapkan BPS pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp454.652,-/ kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp335.793,- (73,86 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp118.859,- (26,14 persen).²⁹

2. Garis kemiskinan pendapatan

Pendekatan ini menggunakan konsep kemiskinan berdasarkan pada pendapatan. Worldbank menetapkan rasio angka kemiskinan di \$ 1,90 per hari per kapita. Artinya, yang dianggap miskin adalah yang memiliki pengeluaran kurang dari 1,90 dolar AS per hari.³⁰

3. Pengukuran indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan

Indeks ini adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap kemiskinan.³¹

C. Distribusi Pendapatan dalam Perspektif Islam

Distribusi dalam Islam merupakan alndasan peredaran harta, kekayaan dan pendapatan agar tidak terkonsentrasi di tangan orang-orang tertentu yang sudah kaya atau berkecukupan secara ekonomi. Al-Qur'an menyebutkan tiga macam tindakan yang mencegah proses distribusi yang adil, yakni larangan menimbun harta, bermegah-megahan yang melalaikan, dan celaan atas penumpukan harta dan terlalu perhitungan. Masalah distribusi pendapatan ini dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW disampaikan dalam upaya membangun tatanan kehidupan sosila ekonomi yang seimbang, yaitu:

1. Pendisitribusian sumber-sumber kekayaan yang penting, misalnya zakat, ghanimah dan harta fa'i, nafkah kepada keluarga serta kerabat.
2. Menegaskan hukum-hukum distribusi, yaitu ada yang wajib atau suka rela (sunnah)
3. Melarang penimbunan dan pemusatan kekayaan pada sekelompok orang tertentu saja
4. Memberikan balasan terbaik bagi orang yang banyak berdistribusi di dunia (kesejahteraan) dan akhirat (surga).³²

Beberapa prinsip distribusi dalam ekonomi Islam menurut Zarqa, yaitu³³:

²⁹ Berita Resmi BPS. *Profil Kemiskinan di Indonesia* Maret 2020 No. 56/07/Th. XXIII, 15 Juli 2020

³⁰ <https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY?view=chart>

³¹ Isnaini Harahap. *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*. (Medan: Pernada Publishing, 2018). Hlm. 147

³² Ibid, hlm. 157-159.

³³ Muhammad Anas Zarqa, *Islamic Distributive Scheme, dalam Munawar Iqbal, Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*, (Leicester UK: IIIE , IIU Islamabad and the Islamic Foundation, 1995), hlm. 166

1. Pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk
2. Menimbulkan efek positif bagi pemberi
3. Menciptakan kebaikan di antara semua orang, antara kaya dan miskin
4. Mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan
5. Pemanfaatan lebih baik terhadap sumber daya alam
6. Memberikan harapan pada orang lain melalui pemberian

Dalam ajaran Islam dikenal dua macam distribusi, yaitu distribusikomersial yang mengikuti pasar dan distribusi keadilan sosial masyarakat, DIstribusi komersial melalui proses ekonmoi, seperti gaji, upah dan keuntungan usaha. Sedangkan distribusi yang bertumpu ada keadilan sosial di antaranya melalui warisan, zakat, infak dan sedekah.³⁴ Sedangkan tujuan distribusi dalam Islam, yaitu:

1. Menyatukan hati manusia dalam kebaikan dan kebenaran dari nilai-nilai ilahiyah sehingga mereka semakin taat kepada pencipta-Nya
2. Membersihkan dan mensucikan manusia dari sifat serakah, tamak, egois, dan individualistis
3. Membangun kesetiakawanan sosial dan kebersamaan, menjalin ikatan cinta kasih sayang danmengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat
4. Tujuan ekonomi., yaitu pengembangan harta, memberdayakan sumber daya manusia, mewujudkan kesejahteraan ekonomi serta pemanfaatan sumber-sumber ekonmi secara efektif dan berdaya guna
5. Menghindari kegiatan spekulatif dan kezaliman dalam distribusi pendapatan dan kekayaan

Untuk merealisasikan distribusi yang adil maka perlu diupayakan adanya politik distribusi yang mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Aturan kepemilikan, baik yang terkait dengan kepemilikan pribadi maupun kepemilikan umum
2. Distribusi pemasukan, yaitu pembagian berdasarkan tugas dan tanggung jawab, besarnya gaji/upah dan tingkat kesejahteraannya, model pembagian hasil dari modal baik modal uang maupun modal barang, serta pemanfaatan tanah
3. Jaminan sosial, yaitu tanggung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat dan negara terhadap individu-individu yang membutuhkan dengan cara memenuhi kebutuhan mereka dan menghindari keburukan mereka, yaitu tidak merealisasikan kebutuhan mereka

D. Soal

1. Jelaskan konsep distribusi pendapatan dan ketimpangan pendapatan.
2. Jelaskan alat-alat ukur ketimpangan pendapatan
3. Jelaskan ukuran kemiskinan menurut World Bank.
4. Jelaskan tujuan distribusi dalam Islam.

³⁴ Zaki Fuad CHalil. *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, hlm. 392-394.

Bab V

Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi

Tujuan Pembelajaran

Pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai tentang:

- a. Pertumbuhan penduduk dan kualitas kehidupan
- b. Kontroversi Malthus dan Transisi demografi
- c. Konsekuensi Pertumbuhan Penduduk Yang Tinggi
- d. Kebijakan Untuk Mengatasi Permasalahan Pertumbuhan

A. Pendahuluan

Penduduk dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Negara yang berkualitas dan berperadaban maju sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia atau penduduknya. Jumlah penduduk yang besar jika diimbangi dengan kualitas yang tinggi dapat menjadi modal dasar pembangunan.

B. Pertumbuhan Penduduk Dan Kualitas Hidup

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu isu penting pada negara-negara berkembang. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan menyebabkan daya dukung lingkungan tidak seimbang sehingga mempengaruhi kualitas manusia dan kualitas hidup. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kebutuhan akan pangan, energi, dan papan. Dari sisi kebutuhan pangan, setiap kenaikan jumlah penduduk akan menaikkan ketersediaan pangan. Begitu juga dengan energi, pertumbuhan penduduk akan memerlukan energi yang besar, sementara ketersediaan energi semakin menipis. Tidak terkecuali masalah papan atau pertumbuhan yang harus disediakan dalam jumlah besar. Masalah ini jika tidak diatur secara tepat akan berujung pada naiknya tingkat pengangguran, kemiskinan, angka kriminalitas, dan sebagainya.³⁵

C. Kontroversi Teori Maltus dan Transisi Demografi

Pemikiran Malthus dalam tulisannya yang berjudul *Essay On The Participle Of Population* di mana Maltus menggambarkan suatu konsep tentang pertambahan hasil yang semakin berkurang (*dimishing returns*). Maltus menyatakan bahwa umumnya penduduk suatu negara mempunyai kecenderungan untuk bertambah menurut suatu deret ukur (1,2,4,8,16,...) yang akan berlipat ganda setiap 30-40 tahun, kecuali bila terjadi bahaya kelaparan. Pada saat yang sama, karena adanya ketentuan pertambahan hasil yang semakin berkurang dari suatu faktor produksi yang jumlahnya tetap (tanah dan sumber daya alam) maka persediaan pangan hanya akan meningkat menurut deret hitung (1,2,3,4,5,...). Tingginya pertumbuhan penduduk ini disebabkan karena hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang tidak bisa dihentikan. Disamping itu manusia untuk hidup memerlukan bahan makanan, sedangkan laju pertumbuhan bahan makanan jauh lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk.

³⁵ Isnaini Harahap. *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*. (Medan: Pernada Publishing, 2018). Hlm, 165-166

Apabila tidak diadakan pembatas terhadap pertumbuhan penduduk, maka manusia akan mengalami kekurangan bahan makanan. Inilah sumber kemeralatan dan kemiskinan manusia.

Pada umumnya gagasan Maltus dalam abad ke 18 dianggap sangat aneh dan mendapat banyak tanggapan oleh para ahli. Mereka memperkirakan bahwa sumber daya alam di dunia baru tidak akan dapat dihabiskan. Beberapa kritik terhadap teori maltus:

- a. Tidak memperhitungkan kemajuan-kemajuan transportasi yang menghubungkan daerah satu dengan yang lain sehingga pengiriman bahan makanan kedaerah-daerah yang kekurangan pangan mudah dilaksanakan.
- b. Tidak memperhitungkan kemajuan yang pesat dalam bidang teknologi, terutama dalam bidang pertanian. Jadi produksi pertanian dapat pula ditingkatkan secara cepat dengan menggunakan teknologi baru
- c. Tidak memperhitungkan usaha pembatasan kelahiran bagi pasangan-pasangan yang sudah menikah. Usaha pembatasan kelahiran ini telah dianjurkan oleh Francis Place pada tahun 1822.
- d. Fertilitas akan menurun apabila terjadi perbaikan ekonomi dan standart hidup penduduk dinaikan . Hal ini tidak dapat diperhitungkan oleh Malthus.

Pada akhir abad ke 19 teori Maltus tentang kependudukan direformulasi dan menghasilkan dua pendekatan yaitu:

1. Teori fisiologis dan sosial ekonomi, adalah sebuah aliran yang menerima pendapat maltus bahwa laju pertumbuhan penduduk melampaui laju pertumbuhan bahan makanan sebagai aksioma. Pada situasi tertentu manusia dapat mempengaruhi perilaku demografinya.
2. Teori teknologi. Penganut kelompok teknologi yang optimis beranggapan bahwa manusia dengan ilmu pengetahuannya mampu melipat gandakan produksi pertanian.³⁶

Transisi demografi adalah suatu model yang menggambarkan perubahan penduduk dari pertumbuhan penduduk tinggi menuju pertumbuhan penduduk yang stabil. Istilah transisi demografi ini diperkenalkan oleh Warren Thompson tahun 1922. Teori ini menggambarkan empat preposisi yang saling berhubungan yang dinyatakan menurut tahap-tahap sesuai dengan pertumbuhan dan berubahnya penduduk. Adapun tahapan peralihan keadaan demografis ini dibagi dalam 4 tingkat, yaitu³⁷:

1. Pertumbuhan sama dengan nol
2. Pertumbuhan yang positif dan terus meningkat
3. Pertumbuhan yang positif tapi menurun
4. Pertumbuhan yang semakin berkurang yang pada akhirnya akan mencapai nol (zero), di mana angka kematian dan angka kelahiran sama sama rendah.

³⁶ Ibid, hlm. 174

³⁷ Ibid, hlm. 175-176.

D. Konsekuensi Pertumbuhan Penduduk Yang Tinggi³⁸

1. Pengaruh pertambahan penduduk terhadap pemenuhan sumber daya alam
Kepadatan penduduk dapat mempengaruhi kualitas penduduk yang data menimbulkan masalah sosial ekonomi, kesejahteraan, ketersediaan udara bersih, kebutuhan pangan, lahan, air bersih dan masalah pencemaran lingkungan.
2. Pengaruh kepadatan populasi manusia terhadap pendidikan
Pendidikan merupakan usaha untuk mencerdaskan manusia sehingga mampu meningkatkan produktivitasnya untuk menghasilkan barang dan jasa. Apabila suatu negara tidak mampu mencukupi sarana dan prasarana pendidikan, maka akan terjadi tingkat rendahnya pendidikan dimana mempengaruhi produktivitas.
3. Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap perkembangan sosial
 - Meningkatnya permintaan terhadap kebutuhan sandang, pangan, dan papan
 - Berkurangnya lahan tempat tinggal
 - Meningkatnya investor
 - Meningkatnya angka pengangguran
4. Pengaruh pertumbuhan penduduk yang cepat terhadap perkembangan kebudayaan
5. Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap kesehatan
 - Prevalensi penyakit menular akibat kepadatan penduduk meningkat
 - Menjamurnya penyakit akibat kemiskinan
 - Masalah karena kebutuhan pangan
 - Masalah pemukiman
 - Meningkatnya usia (usia lanjut) dengan masalah kesehatan
 - Kesehatan lingkungan secara global semakin menurun

E. Kebijakan Untuk Mengatasi Permasalahan Pertumbuhan

Prediksi akan terjadinya ledakan penduduk menyebabkan timbulnya kebijakan untuk mengantisipasi pertambahan penduduk. Pembatasan pertumbuhan penduduk ini dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu³⁹:

1. *Preventive checks* merupakan pengurangan penduduk melalui penekanan kelahiran. *Preventive checks* ini dapat dibagi dua yaitu: moral restrain (pengekangan diri) yaitu segala usaha untuk mengekang nafsu seksual dan *vice* (pengurangan kelahiran) seperti : pengguguran kandungan, penggunaan alat-alat kontrasepsi, homoseksual, *promiscuity*, *adultery*. Bagi maltus moral restrain merupakan pembatasan yang paling penting, sedangkan alat-alat kontrasepsi belum dapat diterimanya.
2. *Positive checks* adalah pengurangan penduduk melalui proses kematian. *Positive checks* dapat dibagi menjadi dua yaitu: *vice* dan *misery*. *Vice* (kejahatan) ialah segala jenis pencabutan nyawa sesama manusia seperti

³⁸ Ibid, hlm. 184-198

³⁹ Ibid, hlm. 199

pembunuhan anak-anak (*infanticide*), pembunuhan orang-orang cacat, dan orang tua. *Misery* (kemelaratan) ialah segala keadaan yang menyebabkan kematian seperti berbagai jenis penyakit dan epidemik, bencana alam, kelaparan, kekurangan pangan, dan peperangan.

Pembatasan kelahiran tidak dibenarkan dalam Islam. Tidak boleh ada suatu undang-undang atau peraturan pemerintah yang membatasi jumlah anak dalam sebuah keluarga. Allah SWT mengecam orang yang tidak mau memperoleh keturunan (menggunakan pil pencegah kehamilan) dengan alasan: takut miskin, tidak dapat memberi makan, takut banyak anak, dan lain-lain. Rasulullah SAW bersabda : “ Nikahilah wanita-wanita yang banyak anak lagi penyayang, karena sesungguhnya aku berlomba-lomba dalam banyak umat dengan umat-umat lain dihari kiamat”. Islam mengharamkan pembunuhan janin dalam rahim, membuang rahim atau membuat sang istri tidak bisa hamil seumur hidup. Termasuk sterilisasi (vasektomi atau tubektomi), karena sama dengan abortus yang berakibat kemandulan. Seperti yang diriwayatkan Muttafaq ‘Alaih bahwa Nabi Muhammad SAW telah melarang pengebirian (al-iktisha’) sebagai teknik untuk mencegah kehamilan secara permanen yang ada pada saat itu. Organisasi berskala internasional seperti International Planned Parenthood Federation, tidak mengaunjurkan kepada negara-negara anggotanya untuk melakukan sterilisasi sebagai alat kontrasepsi. Sedangkan Majma’ Fiqh Islami di Kuwait telah memutuskan untuk emngharamkan proses pemandulan seperti vasektomi dan tubektomi, tanpa ada aasan darurat secara syar’i.⁴⁰ Dalam teori Malthus yang mendasari program KB adalah batil, karena tidak sesuai dengan kenyataan.

Selain pembatasan kelahiran, adajuga dikenal istilah pengaturan kelahiran, yang dijalankan oleh individu (bukan program negara), untuk mencegah kelahiran sementara waktu (bukan permanen), dengan berbagai cara dan sarana yang halal dan tidak berbahaya, maka hukumnya dalam Islam adalah mubah. Pengaturan kelahiran ini dilakukan berdasarkan kesepakatan pasangan suami istri berdasarkan kemaslahatan bersama. Pengaturan kelahiran ini juga bisa dilakukan pada seorang perempuan yang sudah mempunyai banyak anak sehingga akan memberatkan untuknya jika hamil kembali, ataupun mempunyai penyakit yang membahayakan rahimnya dan khawatir penyakitnya menjalar yang menyebabkan kematian dan bahaya-bahaya lain.⁴¹

E. Soal-Soal Latihan

1. Bagaimana kaitan pertumbuhan penduduk dengan kualitas hidup.
2. Jelaskan tentang kontroversi teori Malthus.
3. Sebutkan konsekuensi yang terjadi jika penambahan penduduk semakin tinggi.
4. Jelaskan tentang perspektif Islam pada pembatasan penduduk.

⁴⁰ Ibid, hlm. 200

⁴¹ Ibid, hlm. 201

Bab VI

Pengangguran

Tujuan Pembelajaran

Pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- a. Masalah Ketenagakerjaan
- b. Dimensi – Dimensi Pengangguran di Dunia Ketiga
- c. Dampak Pengangguran

A. Masalah Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan dapat ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.¹

Indonesia sebagai negara berkembang juga memiliki beberapa masalah ketenagakerjaan di Indonesia, yakni⁴² :

1. Rendahnya kualitas tenaga kerja
Kualitas tenaga kerja dalam suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan negara tersebut. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia, tingkat pendidikannya masih rendah. Hal ini menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi rendah. Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas hasil produksi barang dan jasa.
2. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja
Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh perluasan lapangan kerja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian. Angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja akan menyebabkan pengangguran. Padahal harapan pemerintah, semakin banyaknya jumlah angkatan kerja bisa menjadi pendorong pembangunan ekonomi.
3. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata
Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa. Sementara di daerah lain masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Dengan demikian di Pulau Jawa banyak terjadi pengangguran, sementara di daerah lain masih banyak sumber daya alam yang belum dikelola secara maksimal.

⁴² Rinaldi. *Strategi Peningkatan Kualitas Dan Profesionalitas Tenaga Kerja Dalam Menyongsong MEA 2015*. Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka UTCC. Semarang: 26 Agustus 2015, hlm. 10-21.

B. Dimensi – Dimensi Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (Labor Force) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan.⁴³ Pengangguran (Unemployment) merupakan kenyataan yang dihadapi tidak saja oleh negara-negara sedang berkembang (Developed Countries), akan tetapi juga dialami oleh negara-negara yang sudah maju (Developing Countries).

Sebab terjadinya pengangguran dapat digolongkan kepada empat jenis, yaitu⁴⁴:

1. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang wujud apabila ekonomi telah mencapai kesempatan kerja penuh.
2. pengangguran siklikal adalah pengangguran yang disebabkan perkembangan ekonomi yang sangat lambat atau kemerosotan kegiatan ekonomi.
3. Pengangguran struktural, terjadi karena adanya perubahan dalam struktur atau komposisi perekonomian.
4. Pangangguran teknologi, ditimbulkan oleh adanya pengantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia yang disebabkan perkembangan teknologi.

Teori Pendekatan penggunaan tenaga kerja (Labor Utilitization approach) pendekatan ini menitik beratkan pada seseorang apakah cukup dimanfaatkan dalam kerja di lihat dari segi jumlah jam kerja, produktivitas kerja dan pendapatan yang diperoleh. Dengan pendekatan ini dibedakan angkatan kerja dalam tiga golongan yaitu :

1. Menganggur, yaitu orang yang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan.
2. Setengah menganggur, yaitu mereka yang kurang dimanfaatkan dalam bekerja dilihat dari segi jam kerja, produktivitas kerja dan pendapatan.
3. Bekerja penuh atau cukup dimanfaatkan.

Untuk mengelompokkan masing-masing pengangguran tersebut perlu diperhatikan dimensi-dimensi yang berkaitan dengan pengangguran itu sendiri yaitu :

1. Intensitas pekerjaan (yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi makanan).
2. Waktu (banyak di antara mereka yang bekerja ingin bekerja lebih lama).
3. Produktivitas (kurangnya produktivitas sering kali disebabkan oleh kurangnya sumber daya komplementer untuk melakukan pekerjaan).

Berdasarkan dimensi di atas pengangguran dapat dibedakan atas yaitu⁴⁵ :

1. Pengangguran terbuka, baik terbuka maupun terpaksa secara sukarela, mereka tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik sedangkan

⁴³ Muana Nanga. *Makro Ekonomi Teori Masalah dan Kebijakan*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2005), hlm. 249

⁴⁴ Sadono Sukirno. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

⁴⁵ *Indikator Sosial Ekonomi Aceh*. (Jakarta: BPS, 2000), hlm. 8.

- pengangguran terpaksa, mereka mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan.
2. Setengah pengangguran (Under Unemployment) yaitu mereka yang bekerja dimana waktu yang mereka pergunakan kurang dari yang biasa mereka kerjakan.
 3. Tampaknya mereka bekerja, tetapi tidak bekerja, secara penuh. Mereka digolongkan sebagai pengangguran terbuka dan setengah penganggur. Yang termasuk dalam katagori ini adalah :
 - a. Pengangguran tak kentara
 - b. Pengangguran tersembunyi
 - c. Pensiunan awal.

C. Dampak Pengangguran

Akibat buruk pengangguran terhadap perekonomian, yaitu ⁴⁶:

1. Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat meminimumkan tingkat kesejahteraan yang mungkin dicapainya. Pengangguran menyebabkan output aktual yang dicapai lebih rendah dari atau dibawah output potensial. Keadaan ini berarti tingkat kemakmuran masyarakat yang di capai adalah lebih rendah dari tingkat yang akan dicapainya.
2. Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang, pengangguran yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kegiatan ekonomi, pada gilirannya akan menyebabkan pendapatan pajak yang diperoleh pemerintah akan menjadi sedikit. Dengan demikian tingkat pengangguran yang tinggi akan mengurangi kemampuan pemerintah dalam menjalankan berbagai kegiatan pembangunan.
3. Pengangguran yang tinggi akan menghambat, dalam arti tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Keadaan ini jelas bahwa pengangguran tidak akan mendorong perusahaan untuk melakukan investasi di masa yang akan datang.

D. Pengangguran Dalam Islam

Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur dan terpeleset kejurang kemiskinan, karena ditakutkan dengan kemiskinan tersebut seseorang akan berbuat apa saja termasuk yang merugikan orang lain demi terpenuhinya kebutuhan pribadinya. Ada sebuah hadis yang mengatakan:“Kemiskinan akan mendapatkan kepada kekufuran”.

Namun kenyataannya, tingkat pengangguran di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim relatif tinggi. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang buruknya pengangguran, baik bagi individu, masyarakat ataupun negara, akan meningkatkan motivasi untuk bekerja lebih serius. Walaupun Allah Azza Wa Jalla telah berjanji akan menanggung rizqi kita semua, namun hal itu bukan berarti tanpa ada persyaratan yang perlu untuk dipenuhi. Artinya, ada suatu proses yang harus dilalui untuk mendapatkan rizki tersebut.

⁴⁶Paul Samuelson. *Ilmu Makro Ekonomi*, Edisi 17 (terjemahan). (Jakarta: Media Global Edukasi, 2004.), hlm. 326.

Oleh karena itu, semua potensi yang ada harus dapat dimanfaatkan untuk mencari, menciptakan dan menekuni pekerjaan. Muhammad Al Bahi, sebagaimana yang telah dikutip oleh Mursi mengatakan bahwa ada tiga unsur penting untuk menciptakan kehidupan yang positif dan produktif, yaitu⁴⁷ :

1. Mendayagunakan seluruh potensi yang telah dianugerahkan oleh Allah Azza Wa Jalla kepada kita untuk bekerja, melaksanakan gagasan dan memproduksi
2. Bertawakal kepada Allah Azza Wa Jalla, berlandung dan meminta pertolongan kepada-Nya ketika melakukan suatu pekerjaan
3. Percaya kepada Allah Azza Wa Jalla bahwa Dia mampu menolak bahaya, kesombongan dan kediktatoran yang memasuki lapangan pekerjaan.

Dalam kaitannya dengan bidang pekerjaan yang harus dipilih, Islam mendorong umatnya untuk memproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalam segala bentuk seperti : pertanian, pengembalaan, berburu, industri, perdagangan dan lain-lain. Islam semata-mata hanya memerintahkan untuk bekerja tetapi harus bekerja dengan lebih baik (insan), penuh ketekunan dan profesional. Ihsan dalam bekerja bukanlah suatu perkara yang sepele tetapi merupakan suatu kewajiban agama yang harus dipatuhi oleh setiap muslim. “Sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang melakukan pekerjaan yang dilakukan secara itqan (profesional)”.

Menurut Qardhawi, pengangguran dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Pengangguran Jabariyah (terpaksa).
2. Pengangguran Khiyariyah (pilihan).

E. Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan

1. Peningkatan kualitas tenaga kerja
2. Perluasan lapangan kerja atau kesempatan kerja
 - a. Mendirikan industri padat karya (industri yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar) contoh : industri tekstil, industri kendaraan bermotor, industri
 - b. Penyelenggaraan proyek pekerjaan umum, seperti pembangunan jalan, jembatan, bendungan, saluran air, dll
 - c. Mengintensifkan pekerjaan di daerah pedesaan
 - d. Mendorong usaha-usaha kecil dan menengah
 - e. memberikan kredit dengan tujuan dapat meningkatkan investasi sehingga lapangan kerja pun bertambah.
3. Penetapan upah minimum
Dengan menetapkan upah minimum (UMR) sehingga pengusaha dilarang membayar upah dibawah upah minimum.
4. Mengupayakan pemerataan lapangan kerja
Dengan memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan kepada pencari kerja yang bertujuan pencaaker dapat dengan mudah bertemu loker.
5. Mengurangi tingkat pengangguran
 - a. Melakukan penyebaran angkatan kerja ke daerah-daerah yang membutuhkan tenaga kerja

⁴⁷ Abdul Hamid Mursi. *Sumber Daya Manusia yang Produktif pendekatan menurut Al-Qur'an dan Sains*. (Jakarta: Gema Insani Press 1997), hlm. 34.

- b. Mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri yang membutuhkan
- c. Mengadakan program transmigrasi

F. Soal-Soal Latihan

1. Jelaskan beberapa masalah ketenagakerjaan.
2. Jelaskan dimensi – dimensi pengangguran.
3. Jelaskan pengangguran menurut perspektif Islam.
4. Jelaskan cara pemerintah dalam mengatasi pengangguran.

Bab VII

Urbanisasi dan Migrasi

Tujuan pembelajaran

Pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Dilema migrasi dan urbanisasi
2. Urbanisasi : kecenderungan dan proyeksi
3. Pengangguran di perkotaan
4. Menuju teori ekonomi tentang migrasi desa-kota
5. Strategi komprehensif bagi penanggulangan masalah migrasi dan kesempatan kerja

A. Dilema Migrasi Dan Urbanisasi

Migrasi dan urbanisasi selalu berlangsung dan tidak dapat dihindari baik di negara maju maupun negara berkembang. Perpindahan penduduk secara besar-besaran dari desa ke kota dalam beberapa dekade terakhir, khususnya negara-negara yang sedang berkembang. Memacu lajunya tingkat pertumbuhan penduduk yang besar di kota yang berimbas pada masalah ekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan serta masalah sosial.⁴⁸

Migrasi adalah salah satu fenomena penduduk yang dipelajari dalam studi geografi. Migrasi merupakan salah satu dari tiga faktor dasar yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Migrasi dapat meningkatkan jumlah penduduk apabila jumlah penduduk yang masuk ke suatu daerah lebih banyak daripada jumlah penduduk yang meninggalkan wilayah tersebut. Sebaliknya, migrasi dapat mengurangi jumlah penduduk jika jumlah penduduk yang masuk ke suatu wilayah lebih sedikit daripada jumlah penduduk yang meninggalkan wilayah tersebut. Telaah migrasi secara regional dan lokal sangat penting, berkaitan dengan densitas atau kepadatan dan distribusi penduduk yang tidak merata. Ketidakmerataan ini antara lain disebabkan faktor pendorong dan penarik bagi orang-orang yang bermigrasi. Migrasi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Migrasi yang tinggi akan menyebabkan pertumbuhan penduduk yang tinggi pula sedangkan angka emigrasi yang tinggi justru akan menyebabkan pertumbuhan penduduk negatif.

Ada banyak teori yang menjelaskan mengenai alasan orang-orang melakukan migrasi. Teori yang sering digunakan ketika membahas penyebab migrasi adalah teori push and pull factors.

Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang ingin meninggalkan suatu tempat. Faktor pendorong membuat orang tersebut tidak nyaman untuk tinggal di daerah asalnya, sehingga dia mencari tempat tinggal baru. Berikut ini adalah beberapa contoh faktor pendorong migrasi diantaranya yaitu :

1. Kurangnya infrastruktur di daerah asal

⁴⁸ Isnaini Harahap, *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*, (Medan : Perdana Publishing, 2018) hal. 223.

2. Rendahnya ketersediaan fasilitas pendidikan di daerah asal
3. Kurangnya kesempatan kerja/aktivitas ekonomi di daerah asal
4. Masalah dengan tetangga atau lingkungan sekitar
5. Konflik atau bencana pada daerah asal
6. Dipaksa pindah oleh kebijakan pemerintah atau oleh lingkungan.

Sedangkan, faktor penarik adalah faktor yang menyebabkan seorang ingin pindah ke suatu tempat. Faktor penarik membuat tempat tersebut terlihat sangat hebat dan menarik untuk ditinggali sehingga orang-orang mau untuk berpindah. Berikut ini adalah beberapa contoh faktor penarik migrasi diantaranya yaitu :

1. Infrastruktur yang lengkap dan tersedia dengan baik
2. Banyak tersedia lapangan pekerjaan
3. Aksesibilitas terhadap perguruan tinggi yang memadai
4. Kebijakan migrasi yang mudah
5. Keberadaan keluarga atau kerabat yang dekat pada lokasi tujuan
6. Pertumbuhan ekonomi tinggi

Migrasi dapat memiliki dampak positif maupun negatif pada suatu negara/wilayah. Dampak yang dirasakan sangat tergantung pada kesiapan wilayah tersebut dan kualitas para migran. Namun, dampak yang diakibatkan oleh migrasi tidak terbatas pada wilayah yang didatangi oleh migran, migrasi juga mempengaruhi wilayah asal migran. Dampak positif akan dilihat dari perspektif global dan lokal. Perspektif global menyoroti dampak positif dari migrasi eksternal masyarakat Indonesia serta imigrasi pekerja asing yang masuk ke Indonesia. Perspektif lokal akan menyoroti dampak migrasi internal yang dilakukan masyarakat Indonesia antar provinsi, kota, kabupaten, atau satuan wilayah lainnya. Sama seperti dampak positif, dampak negatif juga akan dilihat dari dua perspektif, global dan lokal. Perspektif global akan berfokus pada dampak negatif migrasi penduduk luar negeri ke Indonesia dan sebaliknya, sedangkan lokal akan berfokus pada dampak negatif migrasi penduduk antar satuan wilayah di Indonesia.

B. Urbanisasi : Kecenderungan dan Proyeksi

Ledakan penduduk yang ada pada kenyataannya sangat sulit diimbangi dengan penyediaan perumahan yang layak dan jasa-jasa sosial lainnya. Seiring dengan meluasnya urbanisasi maka pemukiman kumuh ditengah kota terus tumbuh meningkat. Pemerintah yang menjalankan strategi secara ortodoks dengan mengutamakan modernisasi industri, kecanggihan teknologi dan pertumbuhan metropolis mengakibatkan timbulnya ketimpangan geografis atau peluang ekonomi.

1. Peranan Kota

Ekonomi aglomerasi merupakan faktor terbentuknya sebuah kota dimana dapat memberikan keunggulan dari segi biaya produsen dan konsumen yang terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu :

- Ekonomi Urbanisasi, yaitu dampak-dampak yang berkaitan dengan pertumbuhan kawasan geografis yang terpusat secara umum
- Ekonomi Lokalisasi, yaitu dampak-dampak yang ditimbulkan oleh sektor-sektor khusus dalam perekonomian, yang sering muncul apabila biaya transportasi menjadi signifikan. Dimana biasanya pengguna output industri akan mendapatkan keuntungan bila memilih lokasi yang lebih dekat dengan pasar untuk menghemat biaya.

2. Distrik Industri

Distrik industri adalah dimana perusahaan-perusahaan menyukai berada pada lokasi yang memungkinkan mereka belajar dari perusahaan lain dengan aktivitas yang sama, dalam menjadi manfaat untuk melakukan ekonomi aglomerasi. Kedinamisan kelompok industri berbeda terhadap spesialisasi suatu bidang, misalnya dalam kasus yang industrinya bersifat tradisional telah berkembang menjadi kelompok usaha yang maju. Kelompok usaha ini menyerupai distrik di negara maju, tetapi memerlukan pembiayaan yang memadai untuk berinvestasi dalam perusahaan inti yang menggunakan barang modal berskala besar.

3. Skala Perkotaan yang Efisien

Skala perkotaan yang efisien dapat tercapai bagi sejumlah kota industri yang terkait erat, dalam mekanisme pasar yang kompetitif jika para pekerja di sebuah kota besar dengan upah yang lebih tinggi tetapi dengan biaya hidup yang juga tinggi tidak akan lebih beruntung secara materiil dibanding dengan pekerja yang berpendidikan, berpengalaman, kemampuan dan kesejahteraan. Ada dua teori yang dikenal secara umum, yaitu :

- Model hierarki kota atau teori tempat sentral (*urban hierarchy model/central place theory*)
- Model tanah terdiferensiasi (*differentiated plane model*).

4. Masalah yang Ditimbulkan Kota Raksasa

Di negara-negara berkembang, pemerintah kurang aktif membagi aktivitas perekonomian ke ukuran yang lebih memungkinkan untuk diatur dengan baik, salah satu permasalahan yaitu bias terhadap ibu kota. Dimana menerima investasi publik yang sangat besar dan mendorong investasi swasta yang tidak proporsional dibanding kota lain, sehingga ibu kota memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan tingkat aktivitas perekonomian yang tidak efisien. Sistem demokrasi yang digunakan oleh beberapa negara berkembang menjadikan faktor ekonomi politik sebagai kontribusi penting dalam perkembangan ibu kota yang luas dan memberi keuntungan bagi perusahaan karena lokasi yang berdekatan dengan pejabat pemerintah. Namun hal ini dapat di hindari melalui pemberlakuan kebijakan yang demokratis.

C. Pengangguran Di Perkotaan

Salah satu konsekuensi pokok atas menonjolnya arus urbanisasi adalah meledaknya jumlah pencari kerja, baik di sektor formal maupun informal dalam perekonomian perkotaan. Di banyak negara berkembang, tingkat penawaran tenaga kerja jauh melebihi tingkat permintaan sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan semi pengangguran di daerah perkotaan.

D. Menuju Teori Ekonomi Tentang Migrasi Desa-Kota

Teori yang menjelaskan hubungan yang tampak bersifat paradoks mengenai adanya akselerasi migrasi desa-kota dalam konteks meningkatnya jumlah pengangguran di perkotaan dikenal sebagai model migrasi Todaro dan bentuk ekuilibriumnya sebagai model Harris-Todaro. Model migrasi Todaro adalah sebuah teori yang menjelaskan bahwa migrasi desa-kota adalah proses yang secara ekonomi rasional, terlepas dari tingginya pengangguran di perkotaan. Para Migran berkalkulasi (Dalam nilai sekarang) pendapatan yang diharapkan dari bekerja di kota (Atau ekuivalennya) dan bermigrasi jika pendapatan yang diharapkan dengan bekerja di kota, melebihi pendapatan rata-rata di pedesaan. Model Harris Todaro adalah sebuah versi ekuilibrium berdasarkan model migrasi todaro, yang memprediksi bahwa pendapatan yang diharapkan adalah hasil perbandingan antara sektor pedesaan dan sektor perkotaan ketika ikut memperhitungkan aktivitas sektor informal dan pengangguran terbuka.

Migrasi desa-kota bukanlah suatu proses yang memperhitungkan perbandingan antara tingkat upah di kota dan di desa seperti yang diungkapkan model kompetitif, melainkan memperhitungkan perbandingan antara pendapatan yang diharapkan di pedesaan dan perkotaan. Pendapatan yang diharapkan di perkotaan memang begitu tinggi karena itu migrasi akan terus berlangsung meski tingkat pengangguran di kota tinggi.

Model migrasi Todaro memiliki 4 karakteristik dasar, yaitu :

1. Migrasi didorong pertimbangan ekonomi yang rasional tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis.
2. Keputusan bermigrasi bergantung kepada selisih/perbedaan antara upah pedesaan dan upah perkotaan.
3. Lapangan pekerjaan di kota berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran di pedesaan
4. Tingkat pengangguran yang tinggi di perkotaan merupakan akibat dari tidak seimbangnya kawasan ekonomi di desa dan di perkotaan benar.

F. Strategi Komprehensif Bagi Penanggulangan Masalah Migrasi Dan Kesempatan Kerja

- 1). Menciptakan keseimbangan antara ekonomi pedesaan dan ekonomi perkotaan
- 2). Memperluas industri skala kecil padat karya
- 3). Menghilangkan distorsi harga faktor
- 4). Memilih teknologi produksi padat karya yang sesuai
- 5). Memodifikasi keterkaitan antara pendidikan dan lapangan kerja

- 6). Menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk
- 7). Mendesentralisasikan wewenang ke kota-kota dan wilayah sekitarnya

G. Soal-Soal Latihan

1. Jelaskan faktor pendorong migrasi.
2. Jelaskan faktor penarik migrasi.
3. Jelaskan migrasi desa-kota.
4. Jelaskan strategi penanggulangan masalah migrasi.

Bab VIII

Pembiayaan Pembangunan dan UMKM

Pada bab ini mahasiswa diharapkan mampu menguasai:

1. Pembiayaan pembangunan
2. Perbankan Syariah dan Pembiayaan Pembangunan
3. Zakat dan Perannya Dalam Pembangunan
4. Wakaf Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan
5. Sukuk Dan Pembangunan Ekonomi

A. Pembiayaan Pembangunan

Hyman mengungkapkan bahwa pembiayaan pembangunan mempelajari upaya-upaya pemerintah dalam rangka membiayai berbagai pengeluaran pemerintah sesuai fungsinya.⁴⁹ Dalam arti luas pembiayaan pembangunan adalah usaha pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai pembangunan dengan menggunakan sumber-sumber dari pendapatan (*revenue*), utang (*debt*) dan kekayaan (*equity*) yang bersifat konvensional atau non-konvensional. Pengertian ini memiliki implikasi bahwa pemerintah menyadari pembiayaan pembangunan tidak cukup hanya dari APBN/D saja, juga harus melibatkan pihak diluar pemerintah bahkan asing. Pembiayaan pembangunan model bisa berasal dari APBN dan diluar APBN. Diluar APBN berupa, pertama skema refinancing berupa pengalihan portofolio piutang yang proyek fisiknya telah selesai kepada debitur baru. Kedua, skema direct lending pada BUMN-BUMN tertentu yang memiliki *excess of leverage* dan *debt to equity ratio* (DER) masih dibawah 100%, kinerja operasional positif yang berkelanjutan dengan rentang return on asset (ROA) 1%-20%.⁵⁰

B. Perbankan Syariah dan Pembiayaan Pembangunan

Bank Islam atau Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵¹ Perbankan syariah atau Islamic Banking atau *intees-free* Banking adalah bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasionalnya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Perbankan syariah didirikan dengan dasar filosofi yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya. Perbankan syariah didirikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan material dan spiritual masyarakat dan menjalankan syariah islam

⁴⁹ David N. Hyman. *Public Finance*. (London: Dryden Press, 1992).

⁵⁰ Isnaini Harahap, *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*, (Medan : Perdana Publishing, 2018) hal 243.

⁵¹ Muhamad Sadi. *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, (Malang : Setara Press, 2015) hal

dibidang ekonomi. Karenanya perbankan syariah bukan hanya dituntut untuk menghasilkan produk dan jasa sehingga menciptakan pertumbuhan dan kemajuan yang selaras dengan cara hidup Islam namun juga meningkatkan moralitas dan spiritualias masyarakat. Perbankan syariah memiliki tanggung jawab agar semua pihak yang terlibat, pemodal, karyawan maupun nasabah, berinteraksi dan berperilaku secara islami.

C. Zakat dan Perannya Dalam Pembangunan

Sistem ekonomi islam menjadikan instrumen zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan dimasyarakat. Hal ini mengingat tidak semua orang mampu bergelu dalam kancan ekonomi. Atau dengan kata lain sudah menjadi sunnatullah jika didunia ini ada yang kaya. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin. Zakat merupakan sumber potensial untuk mengentaskan kemiskinan yang dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin agar dapat membuka lapangan pekerjaan. Sehingga si penerima zakat memiliki penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Atau sebagai tambahan modal bagi seseorang yang kekurangan modal sehingga usahanya dapat berjalan lancar, penghasilannyapun bertambah, dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, beban negara dalam masalah pengangguran dan kemiskinan bisa berkurang. Disamping itu, secara ekonomi moneter, zakat dapat pula mengekang laju inflasi yang disebabkan oleh peredaran mata uang yang tidak seimbang dan distribusi kekayaan yang tidak merata ditengah masyarakat. Oleh karena itu, dengan pengelolaan zakat yang tepat dan produktif secara bertahap dapat menciptakan stabilitas ekonomi. Tujuan aturan zakat adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Selain untuk tujuan distribusi, analisis kebijakan fiskal dan sistem ekonomi dilakukan untuk stabilitas kegiatan ekonomi.⁵²

Filantropi Islam seperti zakat dan wakaf juga potensial menjadi sumber pembiayaan pembangunan mengingat 88,2% dari total penduduk Indonesia adalah muslim dan 13% diantaranya memiliki pengeluaran lebih dari Rp 2 juta pertahun. Dengan asumsi bahwa penghasilan setiap keluarga tersebut lebih besar daripada pengeluaran, minimal keluarga tersebut mampu membayar zakat sebesar 2,5% dari pengeluarannya. Potensi zakat ini tentunya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan diIndonesia.

Zakat merupakan instrumen utama dalam struktur keuangan negara islam. Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan alat atau tindakan pentransferan sebagian kekayaan orang kaya yang ditujukan untuk orang miskin dan orang yang membutuhkan. Salah satu diskursus yang berkembang dikalangan ekonom muslim adalah menggunakan zakat sebagai instrumen fiskal. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan diantaranya : Pertama, zakat bukan bentuk kedermawanan biasa sebagaimana infak, wakaf dan hibah. Zakat hukumnya wajib, sementara wakaf dan lainnya hukumnya sunnah. Kedua, potensi zakat yang

⁵² Rozalinda. *Ekonomi Islam*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014) hal 248 dan 271

dapat dikumpulkan dari masyarakat sangat besar. Ketiga, zakat berpotensi untuk membantu pencapaian sasaran pembangunan nasional. Keempat, agar dana zakat dapat disalurkan secara tepat, efisien dan efektif, pengumpulan dan pendistribusian zakat yang terpisah-pisah harus disatukan dibawah control negara. Kelima, memberikan control pada pengelola negara. Penerimaan zakat melalui sebuah regulasi hanya dapat disalurkan untuk program-program pengentasan kemiskinan sebagai berikut :

1. Pendidikan, konsentrasi pada peningkatan sarana dan prasarana pendidikan seperti pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, pemberian beasiswa bag keluarga miskin, peningkatan kualitas guru dan peningkatan kualitas kurikulum pendidikan. Sedangkan untuk kesejahteraan guru dibiayai dari penerimaan umum negara lainya.
2. Kesehatan, diprioritaskan untuk membiayai pembangunan unit-unit kesehatan di daerah terutama daerah terpencil dan kantong-kantong kemiskinan, pencegahan dan penanggulangan rawan gizi, sedangkan untuk kesejahteraan dokter dan para medis tetap dibiayai dari penerimaan umum negara lainnya.
3. Kemanusiaan (penanggulangan bencana), dipergunakan membiayai Program Bantuan Tanggap Darurat, Program Rehabilitasi Korban Bencana dan Program Rekonstruksi Pasca Bencana, bantuan sosial kepanti-panti dan program lainnya seperti yang dikelola oleh kementerian Sosial dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat saat ini.
4. Pengembangan ekonomi mikro, diperuntukkan untuk membiayai Program Pelatihan Kewirausahaan, Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro, Pengembangan Usaha Mikro, Pemberdayaan Kaum Marjinal dan Masyarakat Pinggiran. Selain itu juga dapat dikembangkan Public Private Partnership melalui pembentukan The Business Incubator dengan tujuan tercapainya start-up Business, masuknya investor, dan penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian semua belanja modal dan belanja sosial pada Kementerian Pendidikan, Kesehatan, Sosial, UMKM, dan Kesejahteraan Rakyat dapat dibiayai dari penerimaan zakat. Dengan begitu maka APBN akan memiliki keleluasaan dan lebih fokus untuk membiayai program-program investasi dan infrastruktur untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.⁵³

D. Wakaf Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan

Cara menanggulangi kemiskinan tidak hanya dengan zakat namun juga bisa berupa dengan wakaf atau dengan pengembangan kelembagaan (*institutional building*), akses, kesejahteraan (*welfare*), kesadaran (*conscientization*), dan partisipasi politik (*political participation*). sistem wakaf merupakan salah satu pengembangan kelembagaan atau juga bisa disebut dengan mekanisme keuangan. Karena potensi wakaf yang luar biasa bisa menjadi redistribusi ekonomi yang andal. Menurut Zarka dalam Huda dan Haykal, secara konsepsional aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk penyediaan layanan seperti sekolah gratis bagi dhuafa,

⁵³ Ibid hal 246-252

dan proyek wakaf produktif yang dapat menghasilkan pendapatan, seperti menyewakan bangunan pusat pembeanaan.

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan selain zakat, infak, dan sedekah Indonesia namun dengan potensi wakaf yang besar Indonesia belum sepenuhnya secara optimal. Adapun dinegara lain seperti Mesir, Saudi Arabia Yordania, Turki, Bangladesh, Mesir dan Malaysia, wakf telah dikembangkan sebagai salah satu lembaga sosial yang dapat membantu berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah umat seperti kemiskinan sebagaimana yang diungkapkan Prihatini.

Wakaf sebagai sumber pembiayaan pembangunan adalah bahwa keuntungan yang diperoleh dari operasional wakaf dapat dialokasikan untuk pembayaran zakat, dengan mengecualikan pengeluaran zakat dalam bentuk sumbangan dan obligasi. Bahkan sadeq menjelaskan bahwa wakaf tunai dapat ditingkatkan penggunaannya menjadi sertifikat wakaf dari golongan agama yang berbeda dalam perencanaan beberapa proyek. Jadi anggota dari beberapa individu atau institusi yang berbeda dapat membeli sertifikat wakaf dan kemudian bekerja sama dalam pembiayaan beberapa proyek-proyek yang telah direncanakan. Wakaf tunai yang berbeda dapat dimanfaatkan individu dalam setiap aktifitas wakaf. Ini tentu memberikan suatu efek berupa sumber penghasilan dari penggunaan wakaf untuk proyek besardan juga dalam bentuk usaha sendiri. Perencanaan proyek-proyek ini selanjutnya akan dibiayai dari pendapatan wakaf.⁵⁴

E. Sukuk Dan Pembangunan Ekonomi

Sukuk merupakan istilah baru yang dikenakan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah. Istilah suskuk berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak dari kata sakk yang berarti dokumen atau sertifikat. Adapun jika ditinjau dari segi istilah, pengertian sukuk dapat merujuk pada beberapa definisi yang telah dirumuskan, antara lain berdasarkan fatwa AAOIFI (lembaga nirlaba internasional yang bertujuan menyusun dan menyiapkan standardisasi di bidang keuangan syariah) Nomor 17, sukuk adalah sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak terbagi atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau atas kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu.

Di Indonesia, pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara sebenarnya telah dilaksanakan sejak tahun 2010, yaitu ketika diterbitkannya Sukuk Negara dengan seri Project Based Sukuk (PBS). Saat ini porsi penerbitan Sukuk Negara untuk pembiayaan infrastruktur mengalami peningkatan. Hal ini seiring dengan semakin kementrian atau lembaga yang memanfaatkan penerbitan Sukuk Negara untuk pembiayaan proyek. Meningkatnya peran Sukuk Negara dalam pembiayaan infrastruktur, memberi ruang fiskal bagi pemerintah untuk lebih banyak lagi membangun infrastruktur. Dengan demikian, Sukuk Negara dapat menjadi salah satu solusi pembiayaan APBN terutama pembiayaan pembangunan di Indonesia terutama pembiayaan infrastruktur.

Pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara sebenarnya telah dilaksanakan mulai tahun 2010, yaitu sejak diterbitkannya Sukuk Negara

⁵⁴ Ibid hal 256-257

dengan seri Project Based Sukuk (PBS). Mekanisme pertama yang digunakan adalah dengan menggunakan proyek-proyek pemerintah yang tercantum dalam APBN sebagai underlying asset Sukuk Negara. Pemerintah meyakini bahwa Penerbitan Sukuk Negara akan menjadi salah satu sumber utama untuk pembiayaan infrastruktur dimasa yang akan datang karena peluangnya yang sangat besar, yaitu :

1. Dukungan Kebijakan

Dukungan penuh pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara tercermin dari disahkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Negara atau Sukuk Negara. Adanya Undang-Undang tersebut menjadi landasan hukum utama bagi pemerintah untuk menerbitkan Sukuk Negara. Selain itu, peraturan tersebut memberi kewenangan bagi pemerintah untuk menggunakan Barang Milik Negara (BMN) sebagai underlying asset dan membiayai pembangunan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara. Melalui penerbitan pemerintah ini dapat mengatur komposisi penerbitan Sukuk Negara untuk pembiayaan proyek, sehingga hasil penerbitan Sukuk Negara dapat diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.

2. Kebutuhan Pembiayaan Yang Sangat Besar

Dalam rangka mempercepat laju pembangunan infrastruktur, pemerintah telah menetapkan prioritas-prioritas pembangunan infrastruktur yang dituangkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dari data MP3EI kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur berjumlah total sebesar 1.786 triliun rupiah, yang terdiri dari pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, rel kereta, utilitas air, telematika dan infrastruktur lainnya. Kebutuhan dana yang sangat besar tersebut menjadi peluang bagi Sukuk Negara agar dapat lebih berperan dalam mendorong pembangunan infrastruktur. Selain itu, Sukuk Negara juga dapat memberi ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah untuk mengalokasikan sumber-sumber penerimaan negara lainnya untuk pendanaan infrastruktur.

3. Potensi Pasar Sukuk Negara Yang Sangat Luas

Seiring dengan perkembangan ekonomi islam, maka berkembang pula kesadaran untuk memilih instrumen investasi yang sesuai syariah. Kesadaran ini telah menumbuhkan investor yang berwaasan syariah atau hanya berinvestasi pada instrumen syariah.⁵⁵

F. Soal-Soal Latihan

1. Jelaskan pembiayaan pembangunan menurut Hyman>
2. Jelaskan peran zakat dalam pembangunan
3. Bagaimana peran wakaf sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan
4. Jelaskan peran sukuk dalam pembangunan ekonomi

⁵⁵ Ibid hal 262-264

Bab VIII

Transformasi Pertanian Dan Pembangunan Daerah Pedesaan

Tujuan

Pada bab ini mahasiswa diharapkan mampu menguasai:

1. Peran Sektor Pertanian Bagi Pembangunan
2. Konsep Pembangunan Pertanian
3. Peran Penting Kaum Perempuan pada Pembangunan Daerah Pedesaan
4. Perilaku Petani dan Pembangunan Agrikultur
5. Permasalahan Sektor Pertanian

A. Peran Sektor Pertanian Bagi Pembangunan

Sektor pertanian mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Peranan tersebut antara lain: meningkatkan penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Strategi pembangunan pada prioritas pertanian dan ketenaga kerjaan paling tidak memerlukan tiga unsur pelengkap dasar, yaitu⁵⁶:

1. Percepatan pertumbuhan output melalui serangkaian penyesuaian teknologi institusional, dan insentif harga yang khusus di rancang untuk meningkatkan produktifitas para petani kecil
2. Peningkatan permintaan domestik terhadap output pertanian yang di hasilkan dari strategi pembangunan perkotaan yang berorientasikan pada upaya pembinaan ketenagakerjaan
3. Diversifikasi kegiatan pembangunan daerah perdesaan yang bersifat padat karya yaitu non pertanian yang secara langsung dan tidak langsung akan menunjang dan ditunjang oleh masyarakat pertanian.

Sektor pertanian dapat memberikan kontribusi seperti:

1. Peningkatan lapangan pekerjaan sehingga menurunkan tingkat angka pengangguran
2. Menekan tingginya tingkat urbanisasi di negara
3. Menyeimbangkan dalam pertumbuhan sektor industri

Sektor pertanian juga dapat efektif mendorong pertumbuhan di sektor non-pertanian dengan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan yang lebih terbuka, dimana proteksi yang berlebihan bagi sektor industri, terutama lewat nilai tukar, akan menghambat tumbuhnya pertanian dan menghambat terbangunnya industri yang kompetitif
2. Terbentuknya pasar kredit dan perbankan yang efisien

⁵⁶ Isnaini Harahap. *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*. (Medan: Perdana Publishing, 2018), hlm. 267.

3. Terbangunnya infrastruktur pedesaan yang mencukupi dan berkualitas untuk menghubungkan daerah pedesaan dengan pasar output maupun input
4. Manfaat dari pertumbuhan esktor pertanian terdistribusi dengan baik.

Walaupun begitu, ada juga beberapa faktor yang dapat menyebabkan turunnya pangsa pertanian, antara lain:

1. Engel's Law
2. Elastisitas permintaan terhadap off-farm marketing services lebih elastis daripada permintaan terhadap produk di tingkat petani
3. Perubahan dan differential teknologi antara sektor pertanian dan sektor non-pertanian, di mana pertumbuhan teknologi di sektor non-pertanian relatif lebih cepat
4. Akumulasi capital dan pengaruhnya terhadap *endowments capital*-tenaga kerja yang mengakibatkan pangsa sektor pertanian yang intensif tenaga kerja turun relatif terhadap sektor non-pertanian yang cenderung intensif capital.

Kecepatan turunnya pangsa pertanian dalam PDB ini ternyata tidak diikuti dengan kecepatan penurunan yang sama dalam pangsa tenaga kerja. Akibatnya, rata-rata produktivitas per tenaga kerja turun, yang juga menunjukkan turunnya pendapatan petani. Turunnya pangsa pertanian dalam PDB yang tidak disertai dengan turunnya pangsa tenaga kerja dnegan kecepatan yang memadai, menjadikan gap produktivitas tenaga kerja sektor pertanian semakin tertinggal dengan sektor non-pertanian.⁵⁷

B. Konsep Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian yang berhasil dapat diartikan kalau terjadi pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi dan sekaligus terjadi perubahan kearah yang lebih baik.⁵⁸ Untuk mencapai hal tersebut maka harus ada langkah-langkah kebijakan yang harus diambil dalam pembangunan pertanian. Langkah langkah kebijakan yang harus diambil tersebut meliputi usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi, yang intinya tercakup dalam pengertian Trimatra Pembangunan Pertanian yaitu kebijakan usaha tani terpadu, komoditi terpadu dan wilayah terpadu, di samping itu juga harus diperhatikan tiga komponen dasar yang harus dibina yaitu petani, komoditi hasil pertanian dan wilayah pembangunan di mana kegiatan pertanian berlangsung. Pembinaan terhadap petani diarahkan sehingga menghasilkan peningkatan pendapatan petani. Pengembangan komoditi hasil pertanian diarahkan berfungsi sebagai sektor yang menghasilkan bahan pangan, bahan ekspor dan bahan baku bagi industri. Pembinaan terhadap wilayah pertanian bertujuan dapat menunjang pembangunan wilayah seutuhnya dan tidak terjadi ketimpangan antar wilayah.⁵⁹

⁵⁷ Ibid, hlm. 269-270

⁵⁸ Soekartawi. *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian: Teori dan Aplikasi*. (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002).

⁵⁹ Tricahyono. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta:Badan Penerbit Ipwi, 2003).

Pertanian merupakan kebudayaan yang pertama kali dikembangkan manusia sebagai respons terhadap tantangan kelangsungan hidup yang berangsur menjadi sukar karena semakin menipisnya sumber pangan dialam bebas akibat laju pertumbuhan manusia. Menurut Soekartawi agar sasaran pembangunan pertanian tetap mampu mempunyai kontribusi yang nyata dalam perekonomian Indonesia, maka harus ada upaya-upaya yang dilaksanakan, yaitu⁶⁰:

1. Tetap mempertahankan prinsip keunggulan komparatif.
2. Terus meningkatkan keterampilan masyarakat setempat yang memadai dalam memantapkan jenis industri pengelolaan hasil pertanian yang telah dikenal.
3. Terus meningkatkan bahan baku yang berkesinambungan.
4. Terus menyediakan fasilitas kredit dan fasilitas pelayanan yang memadai.

C. Peran Penting Kaum Perempuan Pada Pembangunan Daerah Pedesaan

Selama ini, kaum perempuan telah memberikan kontribusi besar dan penting dalam ekonomi pertanian, khususnya dalam sektor tanaman pangan yang cepat menghasilkan uang. Di berbagai kawasan negara-negara berkembang, jerih payah kaum perempuan selama berjam-jam setiap harinya dalam menghasilkan produk tanaman komersial tetap saja tidak mendapatkan imbalan atau upah. Sementara sumber penghasilan dari produksi pertanian komersial meningkat, control kaum perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi itu justru menurun. Hal ini karena sebagian besar sumber daya rumah tangga, seperti tanah dan input-input lainnya dialihkan dari budidaya tanaman pekarangan ke produksi pertanian komersial itu.⁶¹

Program-program pengembangan yang dijalankan pemerintah negara-negara berkembang selama ini hanya terfokus pada kaum pria saja, sehingga ketimpangan akses ke berbagai sumber daya ekonomi antara kaum pria dan perempuan semakin lama semakin besar. Karena itu, kontribusi perempuan bagi pendapatan keluarga dengan sendirinya merosot. Program-program yang didukung oleh pemerintah belum memberikan perhatian memadai kepada kaum perempuan. Di banyak negara berkembang, seorang perempuan hanya dapat melakukan suatu kontrak atau transaksi ekonomi jika disertai oleh persetujuan tanda tangan suami. Sedikit sekali kaum perempuan yang terlibat dalam program-program pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berbagai macam kendala cultural dan sosial masih menghalangi integrasi kaum perempuan ke dalam program-program pengembangan pertanian di banyak negara-negara berkembang. Secara umum, keterlibatan kaum perempuan dalam berbagai macam proyek pembangunan dan program-program peningkatan kesejahteraan masih sangat terbatas.

Pentingnya peranan dan fungsi ekonomi kaum perempuan dibuktikan dengan keberhasilan yang mengesankan dari program-program pembangunan yang melibatkan partisipasi mereka secara penuh. Sehubungan dengan begitu

⁶⁰ Soekartawi. *Agribisnis: Teori dan Aplikasinya*. (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010)

⁶¹ Isnaini Harahap. *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*. (Medan: Perdana Publishing, 2018), hlm. 276

pentingnya peranan kaum perempuan dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat pertanian, maka setiap program atau proyek pembangunan harus melibatkan kaum perempuan agar juga memperoleh manfaat dan kesempatan yang sama besarnya dengan kaum pria.⁶²

D. Perilaku Petani dan Pembangunan Agrikultur

Berikut ini adalah pembangunan agrikultur terhadap perilaku petani:

1. Pertanian subsisten: keengganan risiko, ketidakpastian, dan kelangsungan hidup
2. Ekonomi bagi hasil dan faktor pasar yang saling terkait
3. Transisi ke arah pertanian campuran
4. Dari keberagaman kepada spesialisasi, yaitu pertanian komersial modern.

E. Permasalahan Sektor Pertanian

Unsur-unsur pertanian pokok, yaitu petani dan keluarganya, sumber daya alam, teknologi dan lingkungan sosial budayanya. Keempat unsur ini yang menjadi satu kesatuan yang saling terkait dan mempengaruhi. Kualitas petani dan keluarganya perlu memperoleh prioritas agar mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan kondisi yang melingkupinya. Tanpa adanya perbaikan kualitas petani dan keluarganya maka berbagai peluang yang muncul dari proses pembangunan akan tidak mampu diraihinya. Akses petani terhadap sumber-sumber produktif semakin terbatas. Pemilik lahan semakin terbatas dari tahun ke tahun sehingga dapat diketahui bahwa kesejahteraan petani tidak mencukupi karena hanya mengandalkan usahatani. Perlu ada kesempatan untuk memperoleh pendapatan di luar usaha tani. Upaya-upaya peningkatan pendapatan petani dari usahatani yang diusahakan perlu ditambahkan dengan pendapatan yang didapat dari usaha atau bekerja di luar usahatani atau di luar pertanian. Peluang-peluang ekonomi perlu diversifikasi dan tidak hanya menggantungkan diri pada ekonomi usahatani.⁶³

F. Ekonomi Pedesaan

Rumahtangga pedesaan relatif heterogen dalam aspek aktivitas yang dilakukan, serta kepentingan relatif dari aktivitas tersebut dalam memberikan pendapatan rumahtangga. Sebagian besar rumahtangga pedesaan beraktivitas di pertanian. Namun, banyak di antara rumahtangga tersebut sumber pendapatan utamanya berasal dari aktivitas non-pertanian. World menunjukkan bahwa rumahtangga pedesaan di Indonesia lebih dari 60 persen berpartisipasi di pertanian, namun kurang dari 30 persen pangsa pendapatan rumahtangga pedesaan berasal dari pertanian. Sumber pendapatan rumahtangga pedesaan berasal dari pertanian, tenaga kerja upahan di desa, ataupun dari migrasi. Sumber pendapatan migrasi adalah dari anggota rumahtangga yang bekerja di luar pedesaan atau bahkan bekerja di luar negeri. Jumlah rumahtangga pedesaan di

⁶² Ibid, hlm. 277

⁶³ Ibid, hlm. 281-282.

Indonesia yang pangsa terbesar pendaatannya bersumber dari pertanian hanyalah 16 persen.

Pertanian yang tumbuh memiliki peran penting dalam transformasi ekonomi pedesaan. Pertanian dapat mempengaruhi aktivitas non-pertanian di pedesaan melalui tiga cara, yaitu produksi, konsumsi dan keterkaitan pasar tenaga kerja. Pada sisi produksi, pertumbuhan sektor pertanian memerlukan input berupa pupuk, pestisida, benih, ataupun alsintan yang diproduksi dan didistribusikan oleh perusahaan nonpertanian. Sektor pertanian yang tumbuh mendorong semakin berkembangnya aktivitas-aktivitas di bagian hilirnya, yaitu dengan menyediakan bahan baku untuk diproses ataupun didistribusikan. Pada sisi konsumsi, meningkatnya pendapatan menyebabkan konsumsi rumahtangga tani meningkat, yang juga berarti permintaan barang ataupun jasa yang dihasilkan sektor non-pertanian meningkat. Sektor pertanian mempengaruhi sisi penawaran dari ekonomi sektor nonpertanian di pedesaan. Upah di sektor pertanian yang bersifat musiman tentunya berpengaruh terhadap penawaran tenaga kerja untuk aktivitas non-pertanian. Peningkatan kesempatan kerja di sektor non-pertanian belum tentu akan menyebabkan meningkatnya tingkat upah.

Peningkatan kesempatan kerja di non-pertanian akan menyebabkan kenaikan upah yang terjadi jika ekonomi sektor non-pertanian di suatu daerah juga akan mempengaruhi aktivitas-aktivitas non-pertanian baik pemasaran, pengolahan ataupun transportasi yang berkembang. Sektor non-pertanian di daerah pedesaan menjadi sumber pertumbuhan dan kesempatan kerja yang penting di mana sektor non-pertanian yang semula bersifat usaha sampingan dan berorientasi subsisten, semakin menjadipenggerak pertumbuhan ekonomi dan menjadi sumber pendapatan yang penting bagi rumahtangga di pedesaan. Indikator lainnya adalah perkembangan pangsa tenaga kerjanya.

Pangsa pasar tenaga kerja sektor non-pertanian di daerah pedesaan tentunya akan meningkat jika di dalamnya dimasukkan daerah-daerah kota yang masih bersifat desa atau *rural towns*⁶⁴ yang lebih didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa di mana tenaga kerja non-pertanian di daerah pedesaan dan *rural towns* lebih cenderung bersifat informal dibandingkan daerah *urban towns*. Kesempatan kerja di sektor non-pertanian di pedesaan terutama penting bagi penduduk pedesaan yang miskin. Buruh tani dapat mengandalkan pendapatannya untuk aktivitas non-pertanian. Aktivitas yang bersumber dari investasi usaha yang membutuhkan modal rendah dan tidak memerlukan ketrampilan tinggi dari tenaga kerjanya merupakan sumber pendapatan utama dari rumahtangga miskin pedesaan relatif jika dibandingkan rumahtangga kaya. Sebaliknya aktivitas bersumber dari investasi yang memerlukan modal besar, umumnya relatif sulit diakses oleh penduduk miskin pedesaan. Perempuan juga memiliki pangsa yang cukup besar dalam tenaga kerja di sektor pertanian dan sektor non-pertanian di pedesaan. Di sektor non-pertanian pedesaan, perempuan lebih terkonsentrasi di bidang perdagangan, industri pengolahan dan jasa. Pangsa perempuan yang bekerja di

⁶⁴ Rural towns adalah daerah-daerah yang struktur ketenagakerjaannya masih mencerminkan keterkaitan kuat dengan pertanian. Sedangkan urban towns adalah daerah yang memiliki basis ekonomi yang independen terhadap pertanian. Istilah rural towns dan urban town ini dikemukakan oleh Hazell dan Hagblade pada tahun 1991. Lihat Ibid, hal. 283-284.

bidang lain seperti transportasi, konstruksi dan keuangan relatif kecil. Sedangkan laki-laki, aktivitasnya relatif tersebar untuk sektor non-pertanian.

G. Strategi Ke Depan

Proses pembangunan secara umum akan menuju pada transformasi perekonomian yang dominan pertanian menuju pada dominasi sektor non-pertanian. Pertanian pada akhirnya dibatasi oleh daya dukung lahan dan pasar produk pertanian. Turunnya peranan pertanian secara relatif merupakan sesuatu yang tak terhindarkan sehingga sulit mengharapkan adanya pencapaian standar hidup yang tinggi tanpa adanya pergeseran yang berarti menuju aktivitas-aktivitas non-pertanian. Hal ini disebabkan:

1. Meningkatnya spesialisasi dalam produksi yang mengakibatkan adanya transfer pekerjaan non-pertanian dari rumah tangga pertanian ke daerah urban
2. Elastisitas pendapatan yang relatif rendah dari permintaan akan produk-produk pertanian dibandingkan produk non-pertanian pada kondisi pendapatan yang meningkat
3. Biaya transportasi yang tinggi untuk berbagai produk pertanian menghalangi adanya spesialisasi yang sangat lanjut pada produksi pertanian.

Strategi terbaik adalah mengutamakan pada pembangunan pertanian dan pedesaan yang didukung oleh industri penyokong secara selektif. Industrialisasi yang dilakukan dengan cepat dan dalam spectrum yang luas akan mengalami hambatan internal dalam bentuk kebutuhan akan *wage goods* dan kapasitas pembentukan modal yang hanya dapat dilakukan oleh sektor pertanian dan pedesaan yang telah berkembang. Ada tiga alternative strategi pembangunan yang dapat dipilih. Strategi pembangunan pertanian pertama, yaitu membiarkan kekuatan-kekuatan ekonomi pasar menentukan arah pembangunan. Strategi ini memiliki asumsi bahwa dalam jangka panjang harga produk pertanian primer cenderung menurun akibat kemajuan teknologi. Peranan sektor pertanian akan menurun secara proporsional pada sisi output dan menurun secara absolute dalam penyerapan tenaga kerja. Strategi ini selaras dengan pandangan bahwa ekonomi terbuka akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika dibandingkan dengan perekonomian tertutup.

Strategi pembangunan pertanian kedua, yaitu perlunya keterlibatan pemerintah yang besar dalam pembangunan. Keterlibatan pemerintah ini diperlukan sejak dari perancangan strategis sampai pada implementasinya. Tujuan pembangunan pertanian dapat dicapai melalui berbagai kekuatan atau strategi, yaitu percepatan pertumbuhan di sektor pertanian, produksi *wage goods*, strategi strukturisasi permintaan yang mengarah pada barang atau jasa yang bersifat intensif tenaga kerja, meningkatkan kesempatan kerja, dan meningkatkan permintaan efektif penduduk berpendapatan rendah. Adapun tiga elemen kunci keberhasilan strategi pembangunan pertanian yang kedua ini, yaitu investasi yang besar di pembangunan sumber daya manusia terutama di pedesaan, penciptaan struktur organisasi pedesaan yang mampu memberikan layanan pada petani sekaligus sebagai sarana penyampaian aspirasi petani, dan investasi yang besar

pada perubahan teknologi yang sesuai bagi petani skala kecil, sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan masyarakat desa secara luas.

Strategi pembangunan ketiga berada di antara strategi pertama dan kedua. Intervensi kebijakan pemerintah mungkin diperlukan untuk mempengaruhi hasil akhir. Namun, intervensi tersebut memanfaatkan pasar dan sektor privat sebagai kendaraannya. Strategi pembangunan pertanian ketiga ini memerlukan pengetahuan yang jelas tentang interaksi antara sektor publik dan sektor privat. Faktor-faktor yang dibutuhkan “*to get agriculture moving*” antara lain adalah kombinasi antara teknologi yang tepat, kelembagaan pedesaan yang fleksibel dan orientasi pasar yang memungkinkan petani memperoleh imbalan yang memadai dari upaya yang telah dikeluarkannya.

Untuk mewujudkan sektor pertanian dan pedesaan yang maju, modern, berdaya saing dan mampu memberi kesejahteraan bagi para pelakunya, maka diperlukan upaya-upaya yang terstruktur dan terukur. Upaya peningkatan kesejahteraan petani, yaitu:

1. Perbaikan dan peningkatan penguasaan petani terhadap aset atau tanah pertanian
2. Peningkatan nilai produk yang dihasilkan per satuan aset yang dikuasai.

Untuk meningkatkan penguasaan petani terhadap aset produktif maka perlu dilakukan upaya untuk memperbesar kapasitas produktif pertanian, yaitu⁶⁵:

1. Melaksanakan reforma agraris secara konsisten
2. Memperluas kesempatan kerja di luar usaha tani
3. Memperbaiki akses petani terhadap sumber-sumber pembiayaan untuk investasi
4. Memperbaiki sarana dan prasarana pertanian dan pedesaan
5. Meningkatkan pendidikan dan kesehatan anggota rumah-tangga petani
6. Mendorong dan meningkatkan pembangunan industri yang berbasis pada sumber daya alam
7. Memperbaiki dan meningkatkan teknologi
8. Memperbaiki kualitas dan meningkatkan kuantitas ketersediaan sarana produksi pertanian
9. Memperbaiki dan meningkatkan akses petani untuk sarana produksi pertanian dan akses pembiayaan untuk modal kerja
10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan pedesaan
11. Mengurangi risiko harga yang dihadapi petani
12. Meningkatkan pendidikan dan kesehatannya bagi petani
13. Menghapuskan berbagai pungutan yang membebani produk pertanian
14. Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam mengelola sumber daya alam
15. Melindungi petani dari persaingan tidak sehat dan tidak adil.

⁶⁵ Ibid, hlm. 288-289.

H. Soal Latihan

1. Sebutkan unsur-unsur pelengkap dasar yang diperlukan pada strategi pembangunan pada prioritas pertanian dan ketenagakerjaan.
2. Jelaskan beberapa faktor yang dapat menyebabkan turunnya pangsa pertanian.
3. Jelaskan upaya-upaya yang harus dilakukan agar sasaran pembangunan pertanian Indonesia tetap mampu mempunyai kontribusi yang nyata.
4. Jelaskan beberapa pembangunan agrikultur terhadap perilaku petani.

Bab X

Lingkungan Hidup Dan Kaitannya Dengan Pembangunan

Tujuan

Pada bab ini mahasiswa diharapkan mampu menguasai:

1. Pembangunan dan Lingkungan Hidup
2. Degradasi Lingkungan Hidup
3. *Sustainable Development*
4. Model Ekonomi Lingkungan Hidup
5. Hubungan Lingkungan Terhadap Populasi, Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi (Environmental Kuznets Curve)

A. Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Pembangunan sebagai upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat membutuhkan faktor lingkungan sebagai unsur produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan juga membutuhkan pembangunan untuk bisa memberikan nilai guna yang dapat diukur secara ekonomi. Kegiatan pembangunan yang menghasilkan berbagai produk baik barang dan jasa telah memberikan manfaat bagi kesejahteraan, kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia di berbagai bidang. Namun, ternyata di sisi lain berdampak terjadinya polusi dan deplesi atau penyusutan sumber daya alam.⁶⁶

Masalah lingkungan mendapat perhatian serius dari kalangan ilmuwa, politisi dan masyarakat umum. Banyaknya kasus pencemaran lingkungan hidup banyak terjadi yang merenggut korban jiwa⁶⁷. Khususnya para ekonom semakin menyadari betapa pentingnya implikasi-implikasi yang terkait dengan lingkungan hidup terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi. Gangguan pada mata rantai ekosistem ini salah satu penyebabnya adalah kegiatan perekonomian yang menjadikan sumber daya alam dan energi menjadi modal utama berlangsungnya proses pembangunan ekonomi. Keberpihakan akan kemajuan ekonomi inilah yang

⁶⁶ Isnaini Harahap. *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*. (Medan: Perdana Publishing, 2018), hlm. 326

⁶⁷ Contoh kasus penyakit yang terjadi di Jepang sekitar tahun 1950 akibat adanya pencemaran sungai yang mengakibatkan munculnya penyakit neurologic yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang disebut penyakit Minamata. Kemudian, Rachel Carson tahun 1962 juga mempublikasikan tulisannya yang berjudul *The Silent Spring* yang berisi tentang penyakit baru yang mengerikan dan mematikan yang disebabkan oleh pencemaran dan penggunaan pestisida. Sehingga hal-hal ini memicu masyarakat dunia untuk mengadakan konferensi lingkungan di Amerika Serikat tahun 1968 dengan tema *The Careless Technology* yang mengemukakan tentang kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari investasi Negara-negara maju ke Negara berkembang yang ternyata menimbulkan kerusakan lingkungan.

mengakibatkan sumber daya alam dan energi menjadi korban bagi kemajuan pembangunan.

Maurice Strong mencetuskan konsep *ecodevelopment*, yang didefinisikan oleh Ignacy Sachs sebagai berikut:

*“.... ecodevelopment is style of development that, in each ecoregion, calls for specific solutions to the particular problems of the region in the light of cultural as well as ecological data and long term as well as immediate needs. Accordingly, it operates with criteria of progress that are related to each particular case, and adaption to the environment plays an important role.”*⁶⁸

Menurut laporan WCED⁶⁹, pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. WCED membuat pendekatan yang dilakukan antara lingkungan dan pembangunan ini berdasarkan 6 aspek, yaitu keterkaitan, berkelanjutan, pemerataan, sekuriti dan risiko lingkungan, pendidikan dan komunikasi serta kerjasama internasional. Di dalam laporan ini terkandung dua gagasan penting, yaitu:

1. Gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan esensial kaum miskin sedunia yang harus diberi prioritas utama
2. Gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan.

Dapat diketahui bahwa generasi yang hidup saat ini harus mampu mengelola sumber daya alam sebaik mungkin dengan memperhatikan prinsip dasar ekologis, yaitu menjaga, memelihara, memanfaatkan serta melestarikan lingkungan guna kehidupan generasi mendatang. Generasi sekarang tidak boleh menghabiskan sumber daya alam atau penggunaannya melampaui kemampuan ekosistem yang ada dan tidak menyisakannya untuk generasi mendatang.⁷⁰

⁶⁸ Di mana, *Ecodevelopment* adalah suatu gaya pembangunan yang dalam setiap kawasan ekologi, membutuhkan solusi khusus bagi masalah tertentu di kawasan tersebut berdasarkan data kultural dan data ekologi serta kebutuhan jangka panjang dan mendesak. Karena itu, pembangunan berwawasan ekologi dilaksanakan berdasarkan kriteria pembangunan yang dihubungkan dengan setiap kasus tertentu, dan penyesuaian diri terhadap lingkungan memainkan peranan penting. Lihat Bjorn Hettne, *Teori Pembangunan dan Tiga Dunia*. (Jakarta: Gramedia. 2001), hlm. 335

⁶⁹ WCED (World Commission on Environment and Development merupakan salah satu badan PBB yang dibentuk tahun 1983 yang berada pada bidang lingkungan dan pembangunan.

⁷⁰ Isnaini Harahap. *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*. (Medan: Perdana Publishing, 2018), hlm. 329-331

B. Degradasi Lingkungan Hidup

Degradasi atau penurunan kualitas lingkungan hidup merugikan kehidupan manusia. Degradasi lingkungan disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu alam dan manusia. Degradasi yang diakibatkan faktor alam ini tidak dapat diprediksi dan dihindarkan oleh manusia sepenuhnya, misalnya gempa bumi, gunung meletus tsunami dan lain-lain. Sedangkan faktor manusia tergantung dari usaha manusia dalam mengendalikan kegiatannya termasuk dalam mengelola lingkungan hidup. Degradasi lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia ini mendorong terjadinya tanah longsor, banjir, pencemaran lingkungan serta kecelakaan industri dan kimia.

Dalam Al-Qur'an, degradasi lingkungan hidup merupakan akibat dari perbuatan manusia. QS Ar-Rum ayat 41 secara eksplisit menegaskan bahwa kerusakan di muka bumi disebabkan perbuatan manusia. Ketika membahas tentang alam, Al-Qur'an selalu menghubungkannya dengan anjuran untuk berfikir, memahami, mengingat, bersyukur dan bertafakkur. Islam sendiri tidak melarang memanfaatkan alam, namun pemanfaatan tersebut harus dengan cara yang baik, bertanggung jawab dan tidak boleh merusak bahkan harus melestarikan alam.

C. Sustainable Development

Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang memberi kemungkinan kepada kelangsungan hidup dengan jalan meningkatkan dan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, memanfaatkan sumber alam sebanyak alam atau teknologi pengelolaan mampu menghasilkannya secara lestari, memberi kesempatan kepada berbagai sektor dan kegiatan untuk berkembang bersama-sama baik di daerah dan kurun waktu yang sama maupun di daerah dan kurun waktu yang berbeda secara sambung menyambung, memperoleh dukungan masyarakat luas yang berperan serta secara aktif, dan menggunakan prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan yang beranekaragam, saat ini maupun di masa mendatang.⁷¹

Berkelanjutan merupakan kegiatan yang secara terus-menerus dan pendefinisian didasarkan pada keadaan saat itu. Keberlanjutan suatu kegiatan untuk masa yang akan datang tidak dijamin kepastiannya, oleh karena banyak

⁷¹ Isnaini Harahap. *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*. (Medan: Perdana Publishing, 2018), hlm. 338.

faktor yang mempengaruhi dan bersifat tidak terduga. Konsep moral yang mendasari pembangunan berkelanjutan adalah tindakan konservasi dalam setiap kegiatan yang akan merusak, mencemari lingkungan hidup, mampu menghitung dampak dari kegiatan yang dilakukan yang dilakukan serta belajar dari setiap kesalahan dalam mengelola lingkungan.

Giddens mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai kemampuan generasi sekarang untuk memastikan bahwa perkembangan tersebut memenuhi kebutuhan-kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka.⁷² Dewees juga menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan di mana kebutuhan sosial melampaui biaya sosial dalam jangka panjang. Lanjutnya, terdapat dua faktor yang membatasi pembangunan berkelanjutan, yaitu pencemaran dan konsumsi dari sumber daya yang dapat diperbaharui dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Pencemaran ini akan mengurangi produktivitas pertanian, perikanan, kehutanan dan merusak kesehatan. Akan sangat besar biaya untuk mengembalikan pada keadaan semula dan menetralkannya dibandingkan mengontrol lingkungan agar tidak tercemar. Sehingga pembangunan berkelanjutan ini membutuhkan peraturan dan kebijaksanaan yang tepat untuk mengatur pencemaran lingkungan dan dampaknya untuk jangka panjang.⁷³

Ada 5 prinsip utama pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yaitu⁷⁴:

1. Prinsip keadilan antar generasi
2. Prinsip keadilan dalam satu generasi
3. Prinsip pencegahan dini
4. Prinsip perlindungan keragaman hayati
5. Internalisasi biaya lingkungan

D. Model Ekonomi Lingkungan Hidup

Dalam ilmu ekonomi, sumber daya alam merupakan potensi ekonomi yang besar sehingga perlu dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, di mana sumber daya alam merupakan salah satu unsur lingkungan hidup yang menjadi mata rantai kehidupan. Perlu adanya keseimbangan untuk semua kepentingan dan penyelamatan bumi dan makhluk hidup dari kehancuran.

⁷² Anthony Giddens. *Jalan Ketiga, pembaruan Demokrasi Sosial*, Penerjemah Ketut Arya Mahardika, (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 64.

⁷³ Donald N. Dewees. *Report of The Environmental Sector Review (Phase II)*, Volume II, Pursuit of Sustainable Development. (Paper), Jakarta, 1987, hlm. 1.

⁷⁴ Selanjutnya disebut sebagai *ecologically sustainable development*. Prinsip ini berdasarkan KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992. Lihat Isnaini Harahap. *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*. (Medan: Perdana Publishing, 2018), hlm. 341-345.

Kegiatan ekonomi dan pelestarian lingkungan dilaksanakan secara bersama dengan strategi mengintegrasikan lingkungan ke dalam pembangunan ekonomi yang meliputi pengembangan pendekatan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pengembangan pendekatan pencegahan pencemaran dan pengembangan sistem neraca ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan.

Menghitung Biaya Eksternalitas

Eksternalitas adalah biaya yang harus ditanggung atau manfaat tidak langsung yang diberikan dari suatu pihak akibat aktivitas ekonomi. Eksternalitas terjadi bila suatu kegiatan menimbulkan manfaat atau biaya bagi kegiatan atau pihak di luar pelaksana kegiatan tersebut. Eksternalitas dalam biaya ini disebut biaya sosial.⁷⁵ di dalam konsep pembangunan berkelanjutan dikenal istilah eksternal ekonomi, eksternal ekologi dan eksternalitas sosial. Teori ekonomi juga menawarkan alternative bagi pengelolaan imbas-pengaruh kegiatan ekonomi yang mencakup bahkan menekankan peran manusia sebagai aktor atau pelaku kegiatan ekonomi.

Hak polusi

Hak polusi adalah izin yang bisa dipindahtangankan untuk membuang sejumlah limbah tertentu ke atmosfer atau air per tahun. Salah satu cara untuk menentukan biaya pencemaran adalah dengan melihat tingkat harga, tetapi bila tidak dapat secara langsung mengetahui harga pasar untuk kerugian karena polusi maka harus ditemukan cara lain, yakni menggunakan harga barang lain seperti berapa nilai udara bersih dan nilai air bersih dengan cara melihat kesediaan membayar bagi pengurangan pencemaran itu. Cara lain dalam menentukan biaya oencemaran ini adalah dengan oemberian subsidi terhadap penekanan jumlah pencemaran apakah dengan mensubsidi pembelian alat-alat penanggulangan pencemaran atau subsidi untuk mengganti kerugian bila diadakan penekanan volume pencemaran di bawah standar yang diijinkan.⁷⁶

Pembatasan secara sah terhadap penguasaan

Dalam hal ini pihak yang bertanggung jawab terhadap biaya sosial akhirnya dilimpahkan kepada pemerintah untuk mengaturnya secara legal.

Perubahan sistem harga

Strategi penetapan harga yang ideal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan harus memasukkan nilai kelangkaan alami dan nilai eksternalitas dari suatu harga sebagai tambahan biaya faktor produksi. Kekeliruan dalam penetapan harga sumber daya alam, dan kegiatan-kegiatan ekonomi yang menurunkan kualitas lingkungan akan menjadi insentif yang menyesatkan dan mengarahkan manusia pada pemborosan sumber daya dan kerusakan lingkungan. Dari sudut ekonomi, penggunaan pendekatan sistemik dalam pembangunan berkelanjutan menjadi konsep intervensi kebijakan yang optimal. Pasar tidak dapat diandalkan mengoreksi masalah ketidaksempurnaan sendiri. Adanya fenomena eksternalitas dan barang publik, misalnya fungsi ekologis lingkungan, karena inheren menyebabkan kegagalan mekanisme pasar bebas. Karena itu perlu

⁷⁵ Ibid, hlm. 353.

⁷⁶ Ibid, hlm. 355

adanya intervensi kebijakan untuk mengoreksi ketidaksempurnaan itu melalui mekanisme pajak dan subsidi.⁷⁷

E. Hubungan Lingkungan Terhadap Populasi, Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi (Environmental Kuznets Curve)

Kuznet sebenarnya mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi sebagai faktor yang menentukan perubahan distribusi pendapatan dalam jangka panjang. Dengan pendapatnya bahwa ketidakmerataan pendapatan naik seiring dengan pertumbuhan ekonomi, walaupun setelah mencapai titik maksimum, ketidakmerataan itu akan menurun seiring dengan pembangunan ekonomi yang lebih baik lagi. Sehingga dapat ditemukan bahwa hubungan antara ketidakmerataan pendapatan dan GDP per kapita membentuk kurva U-terbalik.

Kuznet membahas urbanisasi dan industrialisasi di mana terjadi pergerakan tenaga kerja dari daerah pertanian dengan produktivitas rendah yang memiliki kesenjangan rendah menuju daerah industri yang memiliki produktivitas lebih tinggi yang memiliki kesenjangan tinggi. Ketimpangan pendapatan ini awalnya meningkat karena urbanisasi populasi yang tadinya didominasi sektor yang berpendapatan rendah menjadi didominasi oleh sektor yang pendapatan yang lebih tinggi.⁷⁸

Hipotesis Kuznets ini memperlihatkan kontribusi pertumbuhan ekonomi terhadap emisi yang lebih tinggi tetapi pertumbuhan ekonomi lebih lanjut yang mampu menurunkan degradasi lingkungan sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan pergeseran kegiatan ekonomi ke sektor jasa.⁷⁹ Kurva Kuznets yang berbentuk U-terbalik ini adalah sebagai hasil dari perubahan skala, komposisi, dan teknik yang muncul pada perdagangan liberal dan pertumbuhan ekonomi.⁸⁰ Kurva Kuznets membuktikan bahwa polusi mengikuti pola kurva U-terbalik yang berhubungan dengan pendapatan negara. Pola ini menjelaskan bahwa kurva bergantung pada pengembalian yang meningkat dalam hubungan teknologi dengan konsumsi atas barang yang diinginkan dan mengurangi barang yang tidak diinginkan.⁸¹ TEori Kuznets ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi awalnya akan meningkatkan degradasi lingkungan karena negara akan berfokus pada peningkatan produksi tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Proses produksi ini dilakukan secara terus menerus yang mengakibatkan degradasi lingkungan berupa pencemaran baik terhadap tanah, air, maupun udara. Namun, pertumbuhan ekonomi pada titik tertentu kemudian akan menyadarkan masyarakat bahwa kebutuhan akan kualitas lingkungan yang baik menjadi sangat

⁷⁷ Ibid, hlm. 356.

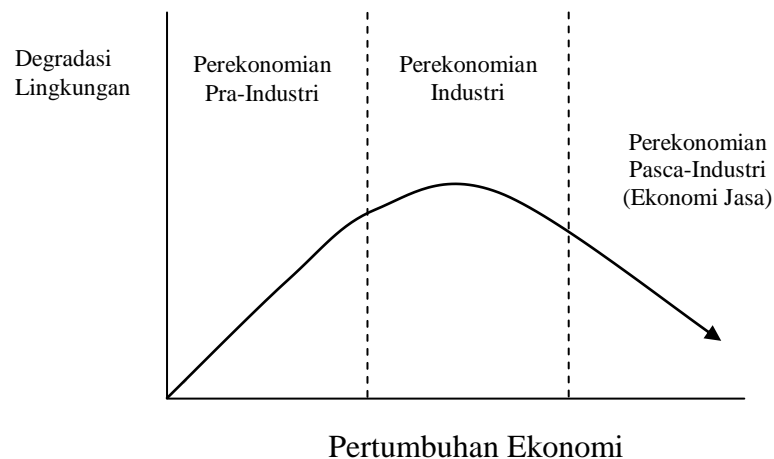
⁷⁸ Simon Kuznets. *Economic Growth and Income Inequality*. (The American Economic Review, 1955)

⁷⁹ M Galeotti. *Economics Growth and The Quality of The Environment: Taking Stock*. (Environment, Development, and Sustainability, 2007).

⁸⁰ Grossman & Krueger. *Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement*. (NBER Working Paper Series, 1991)

⁸¹ J. Andreoni & A. Levinson. *The Simple Analytics of the Environmental Kuznets Curve*. (Journal of Public Economics, 2001), pp. 269-286.

penting. Titik tertentu inilah disebut sebagai titik balik (turning point) di mana pertumbuhan ekonomi akan menurunkan degradasi lingkungan.⁸²



Sumber: Panayotou, 2003.

Gambar 1 Tahapan dalam Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Lingkungan

Model EKC pada gambar menjelaskan hubungan perubahan struktur ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Penjelasan pertama dari hubungan kurva U-terbalik Kuznet adalah tahapan pertumbuhan ekonomi melalui transisi dari pertanian ke industri kemudian pasca- industri dengan sistem berbasis jasa. Kerusakan lingkungan cenderung naik karena perubahan struktur ekonomi dari pedesaan ke perkotaan dan dari pertanian ke industri sebagai produksi masal dan pertumbuhan konsumsi. Hal ini kemudian menurun dengan perubahan struktur ekonomi yang kedua dari industri berat berbasis energi menjadi industri dan jasa berbasis teknologi.⁸³ Pada tahap pertama dari industrialisasi, polusi bertambah dengan cepat karena orang lebih tertarik dalam pekerjaan dan pendapatan daripada udara dan air bersih. Masyarakat terlalu miskin untuk membayar pengendalian dan regulasi lingkungan pun tidak bertanggungjawab.⁸⁴

Pada tingkat pendapatan yang rendah, negara akan beralih dari pertanian ke industri dan intensitas polusi naik sebagai limbah dari bertumbuhnya produksi dan konsumsi masal. Hal ini dikarenakan penggunaan sumber daya alam yang lebih besar, emisi polusi yang lebih banyak, dan tuntutan kenaikan output. Sedangkan pada tingkat pendapatan yang tinggi, kemajuan pembangunan

⁸² Shaharir & Alinor. *The Need for a New Definition of Sustainability*. (Journal of Indonesian Economy and Business Vol.28, 2013), pp. 251-268.

⁸³ T. Panayotou. *Empirical Tests and Policy Analysis of Environmental Degradation at Different Stages of Economic Development*. (World Employment Programme Research Working Paper, 1993).

⁸⁴ S. Dasgupta, B. Laplante, H. Wang, & D. Wheeler. *Confronting the Environmental Kuznets Curve*. (Journal of Economic Perspectives, 2002), pp. 147-168.

ekonomi didominasi pada pasca-industri atau perekonomian jasa. Pada tahap ini kesadaran lingkungan naik, pengeluaran untuk lingkungan lebih tinggi, efisiensi teknologi, dan kenaikan permintaan barang/jasa ramah lingkungan.⁸⁵ Pergerakan kurva yang mulai seimbang membawa sektor industri menjadi lebih bersih, orang menghargai lingkungan lebih tinggi, dan regulasi menjadi lebih efektif.⁸⁶

F. Soal Latihan

1. Jelaskan hubungan pembangunan dan lingkungan hidup.
2. Jelaskan mengapa lingkungan hidup mengalami degradasi.
3. Jelaskan prinsip-prinsip utama pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.
4. Jelaskan tentang hubungan lingkungan terhadap populasi, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.

⁸⁵ M. M. Alam, M. W. Murad, A. H. Noman, & I. Ozturk. *Relationship Among Carbon Emissions, Economic Growth, Energy Consumption, and Population Growth: Testing Environmental Kuznets Curve Hypothesis for Brazil, China, India, and Indonesia*. (Ecological Indicators, Vol 70, 2016), pp. 477-479.

⁸⁶ S. Dasgupta, B. Laplante, H. Wang, & D. Wheeler. *Confronting the Environmental Kuznets Curve*. (Journal of Economic Perspectives, 2002), pp. 147-168.

Bab XI

Pendidikan Dalam Pembangunan

Kompetensi Capaian Pembelajaran

Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang konsep pendidikan dan sumber daya manusia serta menjelaskan tentang:

1. Pendidikan Sebagai Investasi Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Pendidikan Di Negara-Negara Berkembang
3. Pendidikan dan Perempuan
4. Pendidikan Dalam Pandangan Islam

A. Pendidikan Sebagai Investasi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Secara teoritis pembangunan mensyaratkan adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Guna mencapai ini, maka perlu adanya upaya-upaya melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan⁸⁷ baik secara formal maupun informal. Tanpa mengabaikan fungsi yang lainnya maka pendidikan dan penguasaan teknologi adalah prasyarat utama dalam pembangunan. Pengembangan sumber daya manusia suatu negara adalah unsur pokok bagi kemakmuran dan pertumbuhan serta untuk penggunaan pokok bagi kemakmuran dan pertumbuhan serta untuk penggunaan yang efektif atas sumber daya modal fisiknya. Investasi dalam bentuk modal manusia adalah komponen integral dari semua upaya pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pengembangan SDM di Indonesia dilakukan melalui⁸⁸ tiga jalur utama, yaitu :

- a. Pendidikan
- b. Pelatihan
- c. Pengembangan karir di tempat kerja.

Jalur pendidikan merupakan tulang punggung pembangunan SDM yang dimulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Sementara itu, jalur pelatihan dan pengembangan karir ditempat kerja merupakan jalur suplemen dan komplemen terhadap pendidikan. Arah pembangunan SDM di Indonesia ditujukan pada pengembangan kualitas SDM secara komprehensif meliputi aspek kepribadian dan sikap mental, penguasaan ilmu dan teknologi, serta profesionalisme yang semuanya dijiwai oleh nilai-nilai religius, sesuai dengan agamanya.

⁸⁷ Isnaini Harahap. *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*. (Medan: Perdana Publishing, 2018), hlm. 202.

⁸⁸ Umar Tirtahadja, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012) hal. 23-25

Tinjauan dari aspek pendidikan menunjukkan bahwa perkembangan kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah, yakni rasio jumlah siswa terdidik pada usia sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah, baik tingkat dasar, menengah maupun tingkat perguruan tinggi. Semakin besar rasio itu menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penduduk terhadap pendidikan di sekolah mengalami peningkatan. Sebaliknya semakin rendah rasio tersebut menunjukkan tingkat partisipasi penduduk terhadap pendidikan semakin rendah. Sehingga indikator angka partisipasi sekolah dapat menggambarkan perkembangan kualitas sumber daya manusia dapat menggambarkan perkembangan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan. Investasi yang cukup besar pada sumber daya manusia dapat mendorong peningkatan dalam angka partisipasi sekolah. Peningkatan ini dapat berdampak pada peningkatan kualitas maupun kuantitas suatu negara.

Pembangunan SDM melalui pendidikan menyokong secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan karenanya pengeluaran untuk pendidikan harus dipandang sebagai investasi yang produktif dan tidak semata-mata dilihat sebagai sesuatu yang konsumtif tanpa manfaat balikan yang jelas. Schultz memperlihatkan bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan memposisikan manusia sebagai fokus dalam pembangunan telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dicapai melalui terjadinya peningkatan keahlian ataupun keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja.⁸⁹

B. Pendidikan Di Negara-Negara Berkembang

Suatu negara digolongkan sebagai negara berkembang jika negara tersebut belum dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan atau belum dapat menyeimbangkan pencapaian pembangunan yang telah dilakukan. Beberapa ciri khas negara-negara yang sedang berkembang adalah:

1. Secara politis, pada umumnya baru mengalami kemerdekaan atau lepas dari penjajahan barat.
2. Secara ekonomis, pada umumnya miskin dan masih sangat bergantung pada alamnya.
3. Secara demografis, pada umumnya padat penduduk dengan tingkat pertumbuhan penduduk karena kelahiran yang tinggi.
4. Secara budaya, kokoh berpegang pada warisan budaya tradisional secara terus menerus.

Kebijaksanaan pendidikan di negara-negara berkembang umumnya berasal dari warisan kebijaksanaan pendidikan kaum kolonial. Dikatakan demikian karena negara-negara berkembang pada saat baru pertama kali merdeka belum sempat membangun kebijaksanaan pendidikannya sendiri berdasarkan kebutuhan realistik rakyatnya. Kemerdekaan yang telah dicapai di bidang politik tidak dengan sendirinya diikuti oleh kemerdekaan di bidang lainnya, lebih-lebih di bidang

⁸⁹ Isnaini Harahap. *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*. (Medan: Perdana Publishing, 2018), hlm. 203-204.

pendidikan. Di antara ciri-ciri kebijakan pendidikan yang merupakan warisan kaum kolonial adalah:

1. Sifatnya yang elitis atau lebih banyak memberikan kesempatan kepada sekecil masyarakat dan tidak lebih banyak memberikan kesempatan kepada sebagian besar masyarakat.
2. Berorientasi sosio-ekonomik. Orientasi sosio-ekonomik demikian, berkaitan erat dengan jaringan ekonomi internasional di mana negara-negara maju berposisi sebagai sentralnya sementara negara-negara berkembang sekadar sebagai periferalnya.
3. Liberal, rasional, individual, achievement oriented dan social alienated. Ciri-ciri pendidikan demikian, umumnya berbeda dan bahkan berlawanan dengan ciri-ciri masyarakat dan nilai-nilai yang berkembang di negara-negara berkembang. Pendidikannya liberal, padahal masyarakatnya menjunjung tinggi nilai-nilai kolektivisme. Pendidikannya menanamkan rasionalitas, padahal masyarakat di negara-negara berkembang terdapat banyak budaya-budaya yang tidak saja mengembangkan rasionalitas melainkan juga segi-segi emosional dan bathiniah; pendidikannya individual, padahal masyarakatnya menjunjung tinggi kesetiakawanan sosial dan gotong royong; pendidikannya achievement oriented secara sempit sekedar prestasi akademik di kelas; pendidikannya sosial alienated padahal masyarakatnya menginginkan sosialisasi siswa dengan lingkungannya.
4. Tidak berakar pada tradisi dan budaya setempat. Hal demikian sangat memperhatikan, oleh karena pendidikan pada dasarnya adalah pewarisan budaya dan generasi sebelumnya kepada generasi sesudahnya atau penerusnya.
5. Berorientasi pada masyarakat kota, hal ini juga sangat memprihatinkan mengingat sebagian besar wilayah negara-negara berkembang justru terdiri dari pedesaan. Orientasi ke kota demikian lambat atau cepat, langsung maupun tidak langsung bisa menjadikan penyebab lulusan-lulusan pendidikan lebih tertarik dengan kehidupan kota ketimbang bangga membangun desanya.

Ketimpangan-ketimpangan inilah yang menjadi problema pendidikan di negara-negara berkembang di mana problem-problem tersebut lebih banyak disebabkan oleh ketidaksiapan suatu negara dalam menjalankan sistem pemerintahan khususnya dalam sektor pendidikan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya sebuah pendidikan dalam memajukan sebuah peradaban.

C. Pendidikan dan Perempuan

Perempuan masih memiliki keterbatasan akses atas beragam sumber daya produktif, termasuk pendidikan, tanah, informasi dan keuangan. Di banyak negara berkembang, wirausaha yang dikelola oleh perempuan cenderung memiliki kekurangan modal, kurang memiliki akses terhadap mesin, pupuk, informasi tambahan dan kredit dibandingkan wirausaha yang dikelola laki-laki. Ketidaksetaraan ini, baik dalam pendidikan maupun sumber daya produktif

lainnya, berdampak buruk terhadap kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kontribusi perempuan dalam meningkatkan taraf hidup rumah tangga. Ketidaksetaraan juga menurunkan daya tahan saat usia mulai lanjut dan terjadinya goncangan ekonomi. Meski ada kemajuan yang dicapai perempuan dalam pendidikan dewasa ini, tetapi dalam hal upah perempuan masih tetap mendapatkan upah yang rendah dibandingkan laki-laki.

Pendidikan juga penting untuk perempuan terutama dalam mengasuh dan membesarkan anak. Adanya korelasi signifikansi antara tingkat pendidikan ibu dan status gizi anaknya dan angka harapan hidup banyak ditunjukkan oleh banyak studi. Adanya kesehatan dan gizi yang lebih baik dan tingkat fertilitas yang lebih rendah, mendorong produktivitas investasi-investasi lainnya dalam sektor pembangunan lainnya.⁹⁰

D. Pendidikan Dalam Pandangan Islam

Indonesia sudah mengalami kemajuan dalam upaya mengurangi jumlah orang miskin sejak beberapa tahun lalu, namun untuk indikator lainnya seperti penurunan angka kasus kekurangan gizi, Indonesia masih kurang terlambat. Kualitas pendidikan dasar juga memprihatinkan. Pembangunan Indonesia selama ini berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, namun kualitas manusia belum mengalami perbaikan. Perlu adanya orientasi ulang dalam prioritas pembangunan dengan menerapkan paradigma baru dalam pembangunan manusia. Ada empat pilar pembangunan manusia, yaitu

1. Keadilan
2. Berkelanjutan
3. Produktivitas
4. Pemberdayaan⁹¹

Secara kodrati anak memerlukan pendidikan atau bimbingan dari orang dewasa. Dasar kodrati dapat dimengerti dari kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap anak yang hidup di dunia ini. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: "Tiadalah seorang yang dilahirkan melainkan menurut fitrahnya, maka akibat kedua orang tuanyalah yang men-Yahudikan atau men-Nasranikannya atau me-Majusikannya. Sebagaimana halnya binatang yang dilahirkan dengan sempurna, apakah kamu lihat binatang itu tiada berhidung dan bertelinga? Kemudian Abi Hurairah berkata, apabila kau mau bacalah lazimilah fitrah Allah yang telah Allah ciptakan kepada manusia di atas fitrahNya. Tiada penggantian terhadap ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus (Islam)." (H.R Muslim).

Dari Hadits tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa manusia itu untuk dapat menentukan status manusia sebagaimana mestinya adalah harus mendapatkan pendidikan. Dalam hal ini keharusan mendapatkan pendidikan itu jika diamati lebih jauh sebenarnya mengandung aspek-aspek kepentingan yang antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

⁹⁰ Ibid, hlm. 212-216

⁹¹ Ibid, hlm. 216-219.

- a. Aspek pedagogis.
- b. Aspek sosiologis dan kultural.
- c. Aspek tauhid.⁹²

E. Soal-Soal Latihan

1. Jelaskan pengertian pendidikan dan pembangunan!
2. Bagaimana suatu pendidikan dapat dikatakan bermutu?
3. Sebutkan dan jelaskan masalah–masalah yang dihadapi negara berkembang terhadap pendidikan!
4. Bagaimana pandangan Islam terhadap pendidikan.

⁹² Prof. Dr. H. Abudin Nata, M.A. *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana 2012) hal. 28-29

Bab XII

Utang Negara-Negara Dunia Ketiga Dan Stabilitas Makroekonomi

Kompetensi Capaian Pembelajaran

Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang konsep pendidikan dan sumber daya manusia serta menjelaskan tentang:

1. Krisis utang pada dekade 1980 – an
2. Upaya penanggulangan ketidakstabilasi makro ekonomi
3. Strategi untuk melepaskan diri dari utang
4. Pendidikan dalam pandangan Islam

A. Krisis Utang Pada Dekade 1980 – an

Dekade 1980-an bagi banyak negara berkembang adalah periode yang sangat menyulitkan bagi kondisi neraca pembayaran mereka, dalam kaitannya dengan negara-negara lain. Strategi pembangunan konvensional yang dijalankan oleh pemerintah di negara-negara berkembang banyak bertumbuh kepada toleransi terhadap defisit neraca transaksi berjalan (pembangunan itu berlangsung dengan dibayangi oleh adanya defisit transaksi berjalan yang cukup besar). Hal ini mengakibatkan negara berkembang mengadakan impor modal dan barang, sehingga bisa tetap menyediakan mesin-mesin dan peralatan yang dibutuhkan proses industrialisme dengan cepat. Ketika impor terus bertambah, ternyata pendapatan ekspor tidak dapat mengikutinya sehingga terciptalah ketidakseimbangan defisit pada neraca transaksi berjalan. Untuk menutup menutup devisit neraca transaksi berjalan itulah pemerintah negara-negara Dunia Ketiga menggunakan dana-dana bantuan luar negeri resmi yang bersifat antarpemerintah (bilateral) dan investasi langsung oleh perusahaan-perusahaan multinasional, pinjaman swasta yang diberikan oleh kalangan perbankan komersial internasional baik kepada pihak pemerintah maupun piha-pihak swasta dinegara-negara berkembang, serta bantuan multilateral khusus dari bank Dunia dan lembaga-lembaga pembangunan internasional lainnya. Dengan tersedianya sumber pembiayaan yang begitu banyak, maka neraca modal (capital account) negara-negara berkembang acapkali mengalami surplus sehingga bisa menutup devisit pada neraca transaksi berjalan. Surplus itu terkadang begitu besar, melebihi devisit transaksi berjalan yang ada, sehingga negara-negara berkembang bahkan bisa mengakumulasi cadangan internasional.

Faktor-faktor penyebab kemerosotan posisi atau saldo neraca transaksi berjalan selama dekade 1980-an dan 1990-an antara lain :

1. Penurunan yang sangat tajam atas harga-harga komodisi, termasuk minyak.
2. Resesi global pada periode 1981-1982 dan 1991-1992, yang mengakibatkan penyusutan volume perdagangan dunia secara keseluruhan.
3. Meningkatnya proteksionisme negara-negara maju terhadap ekspor dari negara-negara berkembang.

4. Meningkatkan nilai tukar yang terlalu tinggi semakin memperparah posisi ekspor, terutama dinegara-negara pengekspor di Asia Timur dan beberapa negara berkembang penting lainnya, seperti Argentina.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan ekonomi negara-negara Dunia Ketiga, akumulasi utang luar negeri (*external debt*) merupakan suatu gejala umum yang wajar, dimana tabungan dalam negeri rendah, defisit neraca pembayaran sangat tinggi dan impor modal juga sangat dibutuhkan untuk menambah sumber daya domestik. Awal tahun 1970-an, utang negara-negara berkembang relatif kecil, utang tersebut merupakan utang resmi yang bersumber dari pemerintahan negara-negara asing serta lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti IMF, Bank Dunia dan bank-bank pembangunan regional.⁹³

Krisis utang pada dekade 1980-an itu telah mulai ditanam pada periode tahun 1974-1979, saat terjadi ledakan pinjaman internasional yang hebat, yang dipercepat dengan kenaikan harga-harga minyak oleh OPEC. Sejak tahun 1974, negara-negara berkembang mulai memainkan peranan yang lebih besar dalam perekonomian dunia, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 6,6 persen kurun waktu tahun 1967-1973. Negara-negara industri baru di kawasan Amerika Latin, seperti Meksiko, Brasil, Venezuela, dan Argentina, memiliki tingkat pertumbuhan jauh di atas rata-rata negara-negara berkembang lainnya

Dihadapkan pada situasi-situasi kritis seperti ini, negara-negara Dunia Ketiga memiliki dua pilihan kebijakan untuk mengatasinya.

1. Mereka dapat membendung impor serta menerapkan kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter, yang resikonya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
2. Mereka menarik utang lebih banyak lagi untuk membiayainya defisit neraca transaksi yang semakin besar itu.

B. Upaya Penanggulangan Ketidakstabilasi Makro Ekonomi

Adapun suatu instabilitas makro ekonomi (*macroeconomic instability*) ditandai oleh :

1. Lonjakan inflasi domestik
2. Anggaran pemerintah yang buruk
3. Devisit neraca pembayaran
4. Beban hutang lainnya

Salah satu rangkaian kegiatan yang terpaksa ditempuh oleh suatu negara dalam menanggulangi berbagai macam masalah masalah hutang luar negeri. Gagasan dasarnya adalah melalui upaya renegosiasi, bisa diharapkan masa pembayaran utang akan diperpanjang dan suku bunganya bisa direndahkan atau untuk mendapatkan pinjaman tambahan dengan syarat-syarat yang ringan. Tetapi sebelum konsorsium bank internasional bersedia mempertimbangkan untuk memberikan keringanan tersebut, mereka menuntut agar negara pengutang, yang bersangkutan untuk lebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari IMF. IMF baru

⁹³ Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho D, *Manajemen Pembangunan Indonesia (Sebuah Pengantar dan Panduan)*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 110-115.

bersedia memberikan rekomendasi dan bantuan-bantuan finansialnya apabila negara-negara berkembang tersebut sebelumnya bersedia menjalankan resep-resepnya untuk menyembuhkan perekonomian dan memperbaiki kondisi-kondisi neraca pembayaran mereka, yakni dengan melaksanakan Kebijakan-kebijakan Stabilisasi (*Stabilization Policies*).⁹⁴ Kesiediaan negara-negara Dunia Ketiga untuk melakukan kebijakan stabilitas IMF juga mereka nilai sebagai bukti kesungguhan mereka untuk menurunkan defisit neraca pembayaran dan berusaha mengumpulkan devisa untuk melunasi utang-utang mereka terdahulu tepat pada waktunya.

Pihak yang paling dirugikan adalah golongan masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah. Dalam lingkungan perdagangan dunia yang serba tidak adil seperti sekarang ini, masalah-masalah dan krisis neraca pembayaran yang dihadapi oleh negara-negara Dunia Ketiga sebenarnya bersifat struktural dan jangka panjang. Itulah sebabnya kebijakan-kebijakan stabilisasi yang berjangka pendek seperti yang sering dipaksakan oleh IMF tidak akan membuahkan hasil-hasil yang memuaskan, bahkan sebaliknya bisa menyebabkan krisis pembangunan dalam jangka panjang yang lebih parah lagi.⁹⁵

Tanpa adanya restrukturisasi secara besar-besaran terhadap perekonomian domestik negara-negara berkembang itu sendiri mungkin disertai dengan bantuan penyesuaian struktural (*structural adjustment loans*) dari bank-bank dunia dan perombakan tata ekonomi internasional agar lebih adil daripada sekarang ini, maka pada dasarnya setiap pemberlakuan kebijakan-kebijakan ekonomi ortodoks dalam rangka mengejar tujuan-tujuan penyeimbang neraca pembayaran yang juga bersifat ortodoks hanya merusak sistem yang sebenarnya hendak dipertahankan oleh IMF.

C. Strategi untuk Melepaskan Diri dari Utang

Banyak pihak yang khawatir bahwa jika satu atau dua negara pengutang terbesar seperti Brasil, Meksiko atau Argentina benar-benar bangkrut atau apabila mereka memutuskan untuk secara bersama-sama menghapuskan utang mereka secara sepihak dengan membentuk sebuah **kartel pengutang** (*debtor's cartel*). Bagi negara-negara pengutang terbesar yang membentuk kartel pengutang membuat perekonomian dunia menjadi tidak baik karena secara umum dimaknai sebagai monopoli oleh sekelompok orang untuk mengatur produksi atau pengadaan barang, sekaligus menetapkan harganya. Dalam hal ini berarti kartel bisa saja menentukan besaran utang secara sepihak dan menghapuskan utang juga secara sepihak. Banyak usulan yang telah diajukan untuk meringankan atau untuk meregonesiasi beban utang negara-negara pengutang terbesar. Usulan itu sendiri sangat bervariasi yakni mulai dari alokasi baru sejumlah SDR sampai dengan program **restrukturisasi** (*restructuring*) dalam dasar-dasar utang yang memihak negara-negara berkembang.

⁹⁴ Reksohadiprodjo, Sukanto. *Ekonomika Publik Edisi Pertama*. (Yogyakarta: BPFE. 2014), hlm. 50-65.

⁹⁵ Thomas Oatley. *International Political Economy, Interests, And Institutions In The Global Economy, Second Edition*, (New York: Pearson Longman, 2016), hlm. 17.

Pada saat yang bersamaan, banyak negara berkembang berpendapatan rendah yang juga merupakan pengutang terbesar, khususnya yang berada di Afrika, terperangkap dalam satu lingkaran setan. Pembayaran utang eksternalnya justru menciptakan hambatan pertumbuhan ekonomi, padahal pertumbuhan ekonomi itulah yang merupakan satu-satunya harapan bagi mereka untuk membebaskan diri dari jebakan utang untuk selama-lamanya. Dari berbagai macam usulan untuk meringankan utang tersebut ternyata menimbulkan masalah yang pelik yaitu : sebagian besar usulan peringanan utang luar negeri negara-negara Dunia Ketiga terlalu mensyaratkan bak-bank swasta internasional untuk mengambil inisiatif pertama dalam melaksanakan kebijakan. Dalam prakteknya, hampir semua bank komersial swasta internasional tidak bersedia mengambil langkah pertama karena merugikan neraca keuangan mereka.⁹⁶

D. Soal-Soal Latihan

1. Jelaskan krisis utang pada decade 1980-an
2. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab kemerosotan posisi atau saldo neraca transaksi berjalan selama dekade 1980-an dan 1990-an.
3. Apa dua kebijakan dalam mengatasi situasi-situasi kritis seperti krisis utang decade 1980-an yang dilakukan oleh negara-negara Dunia Ketiga ?
4. Jelaskan bagaimana strategi yang dilakukan untuk melepaskan diri dari utang.

⁹⁶ Michael P. Todaro. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Edisi Keenam*. (Jakarta: Erlangga, 1998), hlm.125

DAFTAR PUSTAKA

- Adelman, Irma dan Cynthia' Taft Morris. (1973). *Economic Growth and Social Equity Developing Countries*. Stanford: Stanford University Press.
- Adelman, Irma. 1975. *Development Economics: A Reassessment of Goals*. American Economics Review Paper and Proceedings, hlm. 302 – 309.
- Alam, M. M., M. W. Murad, A. H. Noman, & I. Ozturk. (2016). *Relationship Among Carbon Emissions, Economic Growth, Energy Consumption, and Population Growth: Testing Environmental Kuznets Curve Hypothesis for Brazil, China, India, and Indonesia*. Ecological Indicators, Vol 70.
- Andreoni, J. & A. Levinson. (2001). *The Simple Analytics of the Environmental Kuznets Curve*. (Journal of Public Economics).
- Arsyad, Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik. (2000). *Indikator Sosial Ekonomi Aceh*. Jakarta: BPS.
- Berita Resmi BPS. *Profil Kemiskinan di Indonesia* Maret 2020 No. 56/07/Th. XXIII, 15 Juli 2020
- Chalil, Zaki Fuad. *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*.
- Dasgupta, S., B. Laplante, H. Wang, & D. Wheeler. (2002). *Confronting the Environmental Kuznets Curve*. Journal of Economic Perspective.
- Deweese, Donald N. (1987). *Report of The Environmental Sector Review (Phase II)*, Volume II, Pursuit of Sustainable Development. (Paper), Jakarta.
- Djain, Zulkarnain. (1993). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Galeotti, M. (2007). *Economics Growth and The Quality of The Environment: Taking Stock*. Environment, Development, and Sustainability.
- Giddens, Anthony. (1999). *Jalan Ketiga, pembaruan Demokrasi Sosial*, Penerjemah Ketut Arya Mahardika, Jakarta: Gramedia.
- Grossman & Krueger. (1991). *Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement*. (NBER Working Paper Series).
- Harahap, Isnaini. (2018). *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*. Medan: Pustaka Publishing.

- Hasan, M. & M. Azis. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. Makassar: CV. Nur Lina Bekerjasama dengan Pustaka Taman Ilmu.
- Hettne, Bjorn. (2001). *Teori Pembangunan dan Tiga Dunia*. Jakarta: Gramedia.
- <https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY?view=chart>
- Hyman, David N. (1992). *Public Finance*. London: Dryden Press.
- Jhingan, M.L. (2008). *Ekonomi Pembanguna Dan Perencanaan*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Kuznets, Simon. (1995). *Economic Growth and Income Inequality*. The American Economic Review.
- Lembaga Administrasi Negara. (2008). *Teori dan Indikator Pembangunan*. Jakarta : LAN.
- Mulyani, Endang. *Modul 1: Konsep Dasar dalam Pembangunan Ekonomi dan Permasalahan Dasar Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang*. UT
- Mursi, Abdul Hamid Mursi.(1997). *Sumber Daya Manusia yang Produktif pendekatan menurut Al-Qur'an dan Sains*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Nanga, Muana. (2005). *Makro Ekonomi Teori Masalah dan Kebijakan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Nata, Abudin. (2012). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Oatley, Thomas. (2016). *International Political Economy, Interests, And Institutions In The Global Economy, Second Edition*. New York: Pearson Longman.
- Panayotou, T. (1993). *Empirical Tests and Policy Analysis of Environmental Degradation at Different Stages of Economic Development*. World Employment Programme Research Working Paper.
- Reksohadiprodjo, Sukanto. (2014). *Ekonomika Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Rinaldi. (2015). *Strategi Peningkatan Kualitas Dan Profesionalitas Tenaga Kerja Dalam Menyongsong MEA 2015*. Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka UTCC. Semarang: 26 Agustus 2015, hlm. 10-21.

- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sadi, Muhamad. (2015). *Konsep Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press.
- Sadono, Sukirno. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sadono, Sukirno. (2013). *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Samuelson, Paul. (2004). *Ilmu Makro Ekonomi*, Edisi 17 (terjemahan). Jakarta: Media Global Edukasi.
- Shaharir & Alinor. *The Need for a New Definition of Sustainability*. Journal of Indonesian Economy and Business Vol.28, 2013), pp. 251-268.
- Siahaan, Santi R. (2013). *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Medan: Universitas HKBP Nommensen.
- Soekartawi. (2002). *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekartawi. (2010). *Agribisnis: Teori dan Aplikasinya*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Tirtahadja, Umar. (2012). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (edisi kesembilan, jilid I). Jakarta : Erlangga.
- Tricahyono. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Badan Penerbit Ipwi.
- Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho D. (2006). *Manajemen Pembangunan Indonesia (Sebuah Pengantar dan Panduan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Zarqa, Muhammad Anas. (1995). *Islamic Distributive Scheme, dalam Munawar Iqbal, Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*. Leicester UK: IIIE , IIU Islamabad and the Islamic Foundation.